

**PENGARUH DOKUMEN PERENCANAAN KOMPETENSI
SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP REALISASI
ANGGARAN BELANJA DINAS PENDIDIKAN
DI KABUPATEN POHUWATO**

Oleh

**ASTRIANI MANOPO
E1119093**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana



**PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
GORONTALO
2023**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PENGARUH DOKUMEN PERENCANAAN KOMPETENSI
SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP REALISASI
ANGGARAN BELANJA DINAS PENDIDIKAN
DI KABUPATEN POHUWATO**

Oleh

ASTRIANI MANOPO
E1119093

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
dan Telah di Setujui Oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal
Gorontalo, 10 Mei 2023

PEMBIMBING I



Syamsuddin, SE., Ak., MM
NIDN : 09 130374 02

PEMBIMBING II



Sulfianty, SE., M.Si
NIDN : 09 030984 03

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH DOKUMEN PERENCANAAN KOMPETENSI
SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP REALISASI
ANGGARAN BELANJA DINAS PENDIDIKAN
DI KABUPATEN POHUWATO**

Oleh

ASTRIANI MANOPO
E1119093

Diperiksa Oleh Dewan Penguji Strata Satu (S1)
Universitas Ichsan Gorontalo

1. Purnama Sari, SE.,M.Si
(Ketua Penguji)
2. Kartini Muslimin, SE.,M.Ak
(Anggota Penguji)
3. Taufik Udango, SE.,M.Ak
(Anggota Penguji)
4. Syamsuddin, SE.,Ak.,MM
(Pembimbing Utama)
5. Sulfianty, SE.,M.Si
(Pembimbing Pendamping)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

Dr. Musafir, SE.,M.Si
NIDN : 09 281169 01

Ketua Program Studi Akuntansi

Shella Budawan, SE.,M.Ak
NIDN : 09 210892 02

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah hasil dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang telah di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan secara acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Gorontalo, 03 Juni 2023
Yang Membuat Pernyataan



Astriani Manopo
E1119093

ABSTRACT

ASTRIANI MANOPO. E1119093. THE EFFECT OF PLANNING DOCUMENTS AND HUMAN RESOURCE COMPETENCIES ON THE EXPENDITURE BUDGET REALIZATION OF THE POHUWATO DISTRICT EDUCATION OFFICE

The purposes of this study are to know the effect of planning document factors on budget realization and to determine the effect of human resource competencies on budget realization. This study uses a quantitative research method. Quantitative research is used to examine populations or samples. Data is collected using instruments or measuring instruments, then analyzed statistically or quantitatively. Based on the result of the study, individual planning has a positive effect on the realization of the expenditure budget at the Pohuwato District Education Office. Individual human resource competencies have a positive effect on the realization of the budget at the Pohuwato District Education Office. Planning documents and human resource competencies simultaneously affect the realization of the budget at the Pohuwato District Education Office.

Keywords: planning documents, human resource competencies, budget realization

ABSTRAK

ASTRIANI MANOPO. E1119093. PENGARUH DOKUMEN PERENCANAAN DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP REALISASI ANGGARAN BELANJA DINAS PENDIDIKAN DI KABUPATEN POHUWATO

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh faktor dokumen perencanaan terhadap realisasi anggaran belanja. untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap realisasi anggaran belanja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti populasi atau sampel. Data dikumpulkan dengan menggunakan instrumen atau alat ukur, kemudian dianalisis dengan statistik atau secara kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian, perencanaan individu berpengaruh positif terhadap realisasi anggaran belanja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato. Kompetensi sumber daya manusia secara individu berpengaruh positif terhadap realisasi anggaran belanja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato. Dokumen perencanaan dan kompetensi sumber daya manusia secara simultan berpengaruh terhadap realisasi anggaran belanja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato.

Kata kunci: dokumen perencanaan, kompetensi sumber daya manusia, realisasi anggaran belanja

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul, **“Pengaruh Dokumen Perencanaan, Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Di Kabupaten Pohuwato”** sesuai dengan yang direncanakan. skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, Ucapan terima kasih kepada kedua orang tua dan keluarga yang telah membantu/mendukung dan motivasi hingga karya tulis ini dapat selesai skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada

- Ibu Dr. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo, selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.,
- Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, SE., M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
- Bapak Dr. Musafir, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo.
- Ibu Shella Budiawan, SE., M.Ak Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Ichsan Gorontalo.

- Bapak Syamsuddin, SE.,Ak.,MM selaku Pembimbing I, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan Skripsi ini.,
- Ibu Sulfianty.SE,.M.Si selaku Pembimbing II, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan Skripsi ini.
- Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membimbing penulis dalam mengerjakan Skripsi ini.
- Semua yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Saran dan kritik, penulis harapkan dari dewan penguji dan semua pihak untuk penyempurnaan penulisan Skripsi lebih lanjut.

Penulis menyadari atas keterbatasan yang dimiliki penulis dalam penyelesaian skripsi ini, sehingga sangat diperlukan masukan dan saran. Akhir kata penulis berharap Skripsi penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Gorontalo,2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
ABSTRACT.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2,1. Tinjauan Teori dan Konsep.....	7
2,1.1. Teori Perilaku Terencana (<i>Theory of Planned Behavior</i>).....	7
2,1.2. Anggaran dan Penganggaran.....	9
2,1.3. Anggaran Sektor Publik	11
2,1.4. Fungsi Sektor Publik	12
2,1.5. Mekanisme Penatausahaan Keuangan Daerah	15
2,1.6. Laporan Realisasi Anggaran (LRA).....	21
2,1.7. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Realisasi Anggaran	23
2.2. Penelitian Terdahulu	28
2.3. Kerangka Konseptual	31
2,4. Pengembangan Hipotesis	34

BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1. Obyek Penelitian	39
3.2. Populasi dan Sampel	39
3.2.1 Populasi	39
3.2.2 Sampel	39
3.3. Jenis dan sumber data.....	40
3.3.1 Jenis Data.....	40
3.3.2 Sumber data	40
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.4.1 Riset Lapangan (<i>Field Research</i>).....	41
3.4.2 Riset pustaka (<i>library research</i>).....	42
3.5. Variabel Penelitian dan Definsi Operasional	40
3.5.1 Variabel Penelitian	42
3.5.2 Definisi Operasional	43
3.6. Instrumen Penelitian.....	46
3.6.1 Uji Validitas	46
3.6.2 Uji Reabilitas	47
3.7. Analisis Data	48
3.7.1 Uji Normalitas	48
3.7.2 Analisis Regresi Linear Berganda	48
3.7.3 Koefisien Determinasi	49
3.7.4 Uji F.....	49
3.7.5 Uji Statistik t.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	51
4.1. Deskripsi Data.....	51
4.1.1. Karakteristik Responden	51
4.1.2. Demografi Responden.....	52
4.2. Analisis Data	54
4.2.1 Hasil Uji Kualitas Data	54
4.2.1.1 Uji Validitas.....	54
4.2.1.2 Uji Reabilitas	57

4.2.2 Uji Normalitas	58
4.2.3 Analisis Regresi Berganda	60
4.2.4 Analisis Koefisien Determinasi (R^2).....	61
4.3 Pengujian Hipotesis	61
4.3.1 Hasil Uji F	61
4.3.2 Hasil Uji t	63
4.4 Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis	64
4.4.1 Pengaruh Dokumen Perencanaan terhadap Realisasi Anggaran Belanja	64
4.4.2 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Realisasi Anggaran Belanja	65
BAB V PENUTUP	68
5.1 Kesimpulan	68
5.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	34
Gambar 4.2 Grafik Histogram Uji Normalitas.....	58
Gambar 4.3 Normal P-P Plot Uji Normalitas.....	59

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	29
Tabel 4.1 Distribusi Kuesioner	51
Tabel 4.2 Demografi Responden.....	52
Tabel 4.3. Hasil Uji Validitas Variabel Faktor Dokumen Perencanaan	54
Tabel 4.4. Hasil Uji Validitas Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia ..	55
Tabel 4.5. Hasil Uji Validitas Variabel Realisasi Anggaran Belanja	56
Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas Masing-Masing Variabel.....	57
Tabel 4.7 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	60
Tabel 4.8 Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)	63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Jadwal Penelitian	73
Lampiran 2	Abstrak.....	74
Lampiran 3	Angket Faktor Dokumen Perencanaan, Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Realisasi Anggaran Belanja	76
Lampiran 4	Hasil Uji Validitas Faktor Dokumen Perencanaan(X1)	80
Lampiran 5	Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia(X2)	83
Lampiran 6	Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Realisasi Anggaran Belanja(Y)	84
Lampiran 7	Hasil Regresi Linear Berganda, Koefesien Determinasi (R ²), Uji F, dan Uji t.....	85
Lampiran 8	Surat Izin Penelitian.....	86
Lampiran 9	Surat Balasan Penelitian	87
Lampiran 10	Surat Bebas Plagiasi	88
Lampiran 11	Hasil Turnitin.....	89
Lampiran 12	Curriculum Vitae	91

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah atau sering juga disebut UU Otonomi Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) merupakan bagian dari pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, SKPD diberikan alokasi dana (anggaran) yang dibutuhkan. Oleh karena itu, kepala SKPD disebut juga Pengguna Anggaran (PA). Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKPKD), Kepala Daerah (Gubernur/Walikota/Bupati) mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada kepala SKPD dan pada akhirnya akan meminta kepada kepala SKPD yang bersangkutan untuk membuat pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya. Bentuk pertanggungjawaban tersebut bukanlah SPJ (surat pertanggungjawaban), tetapi berupa laporan keuangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menegaskan bahwa laporan keuangan dimaksud harus disusun berdasarkan proses akuntansi yang wajib dilaksanakan oleh setiap Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran serta Pengelola Bendahara Umum Negara/Daerah. Laporan keuangan

yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Laporan Atas Keuangan (CALK). Tujuan dari pelaporan keuangan ini adalah menyediakan informasi mengenai bagaimana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mendapatkan dana (anggaran) untuk melaksanakan program kerja yang telah disusun.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu instansi pemerintahan, dimana fungsinya untuk mengetahui keadaan keuangan suatu instansi pemerintahan. Laporan realisasi anggaran adalah hasil akhir dari suatu proses akuntansi, yaitu aktivitas pengumpulan dan pengelolaan data keuangan untuk disajikan dalam bentuk laporan atau ikhtisar-ikhtisar lainnya yang dapat digunakan untuk membantu para pemakainya dalam membuat atau mengambil keputusan.

Dalam proses akuntansi yang dilaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar bisa menghasilkan laporan realisasi anggaran, dimulai dari proses ketersediaan SPD (Surat Penyediaan Dana) yang diterbitkan oleh DPPKAD selaku BUD. Selanjutnya SKPD mengajukan SPJ, SPP, dan SPM. Mekanisme tersebut dimulai dari pengajuan SPJ oleh PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) kepada bendahara pengeluaran. Kemudian bendahara pengeluaran membuat SPP dan SPM, dimana SPP ditandatangani oleh bendahara pengeluaran dan SPM ditandatangani oleh pengguna anggaran. Setelah lengkap berkas tersebut kemudian diverifikasi oleh PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan). Selesai diverifikasi kemudian diajukan ke BUD

(Bendahara Umum Daerah) untuk menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana). Apabila pengurusan berkas administrasi tersebut berjalan dengan lancar, maka program kegiatan yang telah direncanakan oleh SKPD akan segera terealisasi.

Laporan realisasi anggaran disajikan sedemikian rupa sehinggamemperlihatkan berbagai unsur pendapatan, belanja, surplus/defisit, danpembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Dalam menyusun LRA,sebagaimana diatur dalam PSAP Nomor 02, klasifikasi yang dicantumkan padalembar muka laporan keuangan adalah menurut jenis belanja sebagai belanjatidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Selanjutnya, kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari : belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari : belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan program kegiatan yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja

laporan realisasi anggaran dimulai dari masukan (input) yang berupa jumlah anggaran belanja dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai program kegiatan yang telah direncanakan hal ini merupakan proses. Hasil dari proses tersebut merupakan keluaran (output) dalam bentuk analisis anggaran belanja yang dibandingkan dengan realisasi belanja. Dari analisis laporan tersebut digunakan untuk menilai bagaimana dampak (outcome) dari program yang telah dilaksanakan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Laporan realisasi anggaran merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolok ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program.

Akibatnya anggaran yang sudah tersedia di awal tahun dan merupakan hak masyarakat dalam bentuk pelayanan publik, terpaksa tidak bisa dilaksanakan karena SKPD cenderung membelanjakannya di akhir tahun. Padahal apabila realisasi belanja dilaksanakan di awal tahun, maka pertumbuhan ekonomi telah terjadi di awal tahun dan akan berdampak pada pelaksanaan program dan kegiatan SKPD yang menyentuh langsung kepada masyarakat dalam hal penciptaan lapangan kerja, pemenuhan kebutuhan pangan, pengurangan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan inilah yang ingin diteliti, sehingga tertarik untuk melakukan penelitian dengan memilih judul : ” **Pengaruh Dokumen Perencanaan, Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh Terhadap Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Di Kabupaten Pohuwato**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah faktor dokumen perencanaan terhadap realisasi anggaran belanja?
2. Apakah kompetensi sumber daya manusia terhadap realisasi anggaran belanja?
3. Faktor Dokumen perencanaan dan Faktor kompetensi sumber daya manusia secara simultan berpengaruh terhadap realisasi anggaran belanja

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitinn

1.3.I Maksud penelitian.

Adapun maksud penelitian yang dilakukan pada Dinas Pendidikan adalah untuk mendapat data-data yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, terutama, yaitu data yang diperoleh diperoleh melalui penelitian dengan menyedankan kuesiner kepada responden

1.3.2. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengaruh faktor dokumen perencanaan terhadap realisasi anggaran belanja.
2. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap realisasi anggaran belanja.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dalam hal pengembangan wawasan dibidang anggaran pemerintah daerah dan dapat

menjadisumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu akademik serta dapat dijadikan referensi atau bukti tambahan untuk peneliti-peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang topik yang sama.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan informasi dan bahan referensi untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait realisasi penyerapan anggaran belanja agar dapat terserap secara proporsional. Khususnya pada SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1. Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Teori perilaku terencana atau TPB (*Theory of Planned Behavior*) merupakan pengembangan lebih lanjut dari teori perilaku beralasan (*Theory of Reasoned Action*). TPB merupakan kerangka berpikir konseptual yang bertujuan untuk menjelaskan determinan perilaku tertentu. Faktor sentral dari perilaku individu adalah bahwa perilaku itu dipengaruhi oleh niat individu (*behavior intention*) terhadap perilaku tertentu tersebut. Niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga komponen yaitu (1) sikap (*attitude*) terhadap perilaku dimana individu menilai atas sesuatu yang menguntungkan dan tidak menguntungkan, (2) norma subjektif (*subjective norm*) merupakan tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, dan (3) persepsi kontrol berperilaku (*perceived behavior control*) yang berpedoman pada persepsi kemudahan atau kesulitan dalam melakukan suatu perilaku dan diasumsikan untuk mencerminkan pengalaman masa lalu sebagai antisipasi hambatan dan rintangan.

Fishbein dan Ajzen dalam Aloysia dan Yuliana (2004:135) berpendapat, Planned behavior theory didasarkan atas pendekatan terhadap *beliefs* yang dapat mendorong individu untuk melakukan perilaku tertentu. Pendekatan terhadap *beliefs* dilakukan dengan mengasosiasikan

berbagai karakteristik, kualitas, dan atribut berdasarkan informasi yang telah dimiliki, kemudian secara otomatis akan terbentuk intensi untuk berperilaku. Pendekatan dalam *planned behavior theory* dikhususkan pada perilaku spesifik yang dilakukan individu dan dapat digunakan untuk semua perilaku secara umum

Keyakinan yang menonjol ini dapat dibedakan menjadi tiga yaitu pertama, *behavior belief* yaitu keyakinan individu akan hasil suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. *Behavior belief* akan mempengaruhi sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*). Kedua adalah *normative belief* yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif orang lain yang menjadi rujukannya seperti keluarga, teman, atasan, dan motivasi untuk mencapai harapan tersebut. Harapan normatif ini membentuk variabel norma subjektif (*subjective norm*) atas suatu perilaku. Ketiga adalah *control belief* yaitu keyakinan individu tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilakunya dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung atau menghambat perilakunya. *Control belief* membentuk variabel persepsi kontrol keperilakuan (*perceived behavior control*). Dalam TPB sikap, norma subjektif dan persepsi kontrol keperilakuan ditentukan melalui keyakinan- keyakinan utama. Determinan suatu perilaku merupakan hasil dari penilaian keyakinan-keyakinan dari individu, baik secara positif maupun negatif. Teori perilaku terencana atau TPB (*Theory of Planned Behavior*) didasarkan pada asumsi bahwa manusia adalah makhluk yang rasional dan

menggunakan informasi-informasi yang mungkin baginya secara sistematis. Orang memikirkan implikasi dari tindakan mereka sebelum mereka memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku-perilaku tertentu. TPB dapat mendorong seseorang yang bekerja pada instansi pemerintah untuk membuat perencanaan program kegiatan dengan baik (sikap) dan berusaha agar setiap program kegiatan yang dilaksanakan tepat sasaran dan tepat waktu (norma subjektif). Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (persepsi kontrol berperilaku). Pelaksanaan program kegiatan tersebut didanai dari APBD dan tercermin dalam laporan realisasi anggaran.

2.1.2. Anggaran dan Penganggaran

Pengertian anggaran menurut para ahli adalah sebagai berikut.

- a. Menurut Mardiasmo (2009:61) "Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial".
- b. Menurut Harryanto (2008:3) "Anggaran dalam arti luas meliputi jangka waktu anggaran direncanakan, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan. Anggaran dalam arti sempit meliputi rencana penerimaan dan pengeluaran dalam satu tahun saja."
- c. Menurut Munandar (2001:3) "Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku dalam jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang."

- d. Nafarin (2007:11) menyatakan bahwa “Anggaran adalah suatu rencana kuantitatif (satuan jumlah) periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan.” Anggaran (budget) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan dan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan moneter untuk jangka waktu tertentu. Perencanaan dalam anggaran biasanya mencakup berbagai kegiatan operasional yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dengan suatu pendekatan formal dan sistematis dari pelaksanaan tanggung jawab manajemen. Pendekatan formal dan sistematis yang dimaksud disini adalah penganggaran.

Menurut Harryanto (2008:3), “penganggaran (*budgeting*) merupakan aktivitas mengalokasikan sumber daya keuangan yang terbatas untuk pembiayaan belanja organisasi yang cenderung tidak terbatas”. Mardiasmo (2009:61) berpendapat, “penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran”.

Sedangkan menurut Supriyono (1999:15), “penganggaran merupakan perencanaan keuangan perusahaan yang dipakai sebagai dasar pengendalian (pengawasan) keuangan perusahaan untuk periode yang akan datang”. Jadi

dapat disimpulkan bahwa penganggaran merupakan proses mengalokasikan sumber daya keuangan yang terbatas sebagai dasar pengendalian (pengawasan) keuangan perusahaan untuk periode yang akan datang.

2.1.3. Anggaran Sektor Publik

Anggaran sektor publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Mardiasmo (2009:62) menyatakan, Anggaran sektor publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi dimasa yang akan datang.

Menurut Nordiawan dan Hertianti (2010:44) “Anggaran dalam organisasi sektor publik tidak hanya sebagai rencana tahunan, tetapi juga alat akuntabilitas atas pengelolaan dana publik yang dibebankan kepadanya”.

Sedangkan menurut Syamsi (1994:72), Anggaran negara adalah hasil dari suatu perencanaan yang berupa daftar mengenai bermacam - macam kegiatan terpadu, baik menyangkut penerimaannya maupun pengeluarannya yang dinyatakan dalam satuan uang dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian anggaran sektor publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan mengenai bermacam - macam kegiatan terpadu, baik menyangkut penerimaannya maupun pengeluarannya yang dinyatakan dalam satuan uang dalam jangka waktu Anggaran tertentu.

2.1.4. Fungsi Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2009:63), Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu sebagai (1) alat perencanaan, (2) alat pengendalian, (3) alat kebijakan fiskal, (4) alat politik, (5) alat koordinasi dan komunikasi, (6) alat penilaian kinerja, (7) alat motivasi, dan (8) alat menciptakan ruang publik. Anggaran merupakan alat perencanaan (*planning tool*) manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Anggaran sebagai alat pengendali (*control tool*) memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Anggaran merupakan alat untuk memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program atau kegiatan pemerintah. Sebagai alat pengendali manajerial anggaran digunakan untuk meyakinkan bahwa pemerintah mempunyai uang yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Selain itu, anggaran digunakan untuk memberi informasi dan meyakinkan legislatif bahwa pemerintah bekerja secara efisien dan efektif.

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal (*fiscal tool*) pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan

mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Anggaran sebagai alat politik (*political tool*) digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesempatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Anggaran bukan sekedar masalah teknis akan tetapi lebih merupakan alat politik.

Oleh karena itu, pembuatan anggaran publik membutuhkan *political skill, coalition building*, keahlian bernegosiasi dan pemahaman tentang prinsip manajemen keuangan publik oleh para manajer publik. Manajer publik harus sadar sepenuhnya bahwa kegagalan dalam melaksanakan anggaran yang telah disetujui dapat menjatuhkan kepemimpinannya, atau paling tidak menurunkan kredibilitas pemerintah.

Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi (*coordination and communication tool*) dimana setiap unit kerja pemerintah terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Di samping itu, anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkup eksekutif. Anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk

dilaksanakan. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja (*performance measurement tool*) merupakan wujud komitmen dari *budget holder* (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa yang berhasil ia capai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja.

Anggaran sebagai alat motivasi (*motivation tool*) digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Agar dapat memotivasi pegawai, anggaran hendaknya bersifat *challenging but attainable* atau *demanding but achievable*. Maksudnya adalah target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi namun juga jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai.

Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik (*public sphere*) dimana anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat, dan DPR/DPRD. Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik. Kelompok masyarakat yang terorganisir akan coba mempengaruhi anggaran pemerintah untuk kepentingan mereka. Kelompok lain dari masyarakat yang kurang terorganisasi akan mempercayakan aspirasinya melalui proses politik yang ada. Pengangguran, tunawisma, dan kelompok lain yang tak

terorganisasi akan dengan mudah dan tidak berdaya mengikuti tindakan pemerintah. Jika tidak ada alat untuk menyampaikan suara mereka, maka mereka akan mengambil tindakan dengan jalan lain seperti dengan tindakan massa, melakukan boikot, vandalisme, dan sebagainya.

2.1.5. Mekanisme Penatausahaan Keuangan Daerah

Dalam melaksanakan mekanisme penatausahaan keuangan daerah khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani pengeluaran kas yakni bagaimana proses analisa, penggolongan atau pengelompokan, pengihktisaran dan pelaporan transaksi keuangan dalam rangka untuk pertanggungjawaban pengelolaan APBD yang dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) dengan pengeluaran kas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang baik secara manual maupun dengan sistem yang sudah terkomputerisasi.

Mekanisme penatausahaan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah sebagai berikut.

1. Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) Penerbitan Surat Penyediaan Dana merupakan Surat Penyediaan dana yang dibuat oleh BUD atas dasar anggaran kas yang telah diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah , agar dalam penatausahaan keuangan daerah dapat berjalan dengan baik. Dalam penatausahaan keuangan tersebut BUD harus

mampu memperhitungkan jumlah penyediaan dana kas bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah karena hal tersebut akan mengurangi jumlah dana yang dapat disediakan dalam satu kali pengajuan Penerbitan Surat Penyediaan Dana serta periode pengajuan Penerbitan Surat Penyediaan Dana. Penerbitan Penerbitan Surat Penyediaan Dana dapat dilakukan pada awal tahun untuk belanja tidak langsung dan pada awal triwulan untuk belanja langsung.

2. Pembuatan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Setelah diterbitkannya Penerbitan Surat Penyediaan Dana oleh PPKD, maka berdasarkan Penerbitan Surat Penyediaan Dana tersebut atau dokumen yang dipersamakan dengan Penerbitan Surat Penyediaan Dana, selanjutnya bendahara pengeluaran membuat dan mengajukan surat pengantar SPP yang ditujukan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) SKPD. SPP yang diajukan harus sesuai dengan Surat Penyediaan Dana sebagai dasar berapa jumlah yang akan diminta untuk dibayarkan kepada SKPD.

Dalam hal ini, SPP terbagi dalam 4 jenis yaitu sebagai berikut.

a. SPP Uang Persediaan (SPP-UP)

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka untuk pengisian uang persediaan. Pengajuan SPP-UP ini hanya

dilakukan sekali dalam setahun biasanya diajukan pada awal tahun anggaran setelah terbit Surat Penyediaan Dana belanja langsung.

b. SPP Ganti Uang (SPP-GU)

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh bendaharapengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari penggunaanggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangkasebagai ganti uang persediaan. SPP-GU digunakan untuk melakukanpenggantian uang persediaan yang sudah terpakai. Pengajuan SPP-GUini diajukan ketika uang persediaan habis berdasarkan SPD belanjalangsung yang terbit per triwulan.

c. SPP Tambahan Uang (SPP-TU)

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka sebagai tambahan uang persediaan. SPP-TU dipergunakan ketika SKPD meminta tambahan uang yang disebabkan apabila terjadi beberapa program kegiatan yang memerlukan jumlah anggaran yang besar sehingga saldo uang persediaan tidak cukup untuk membiayainya.Biasanya pembuatan SPP-TU ini harus berdasarkan pada perencanaan perkiraan pengeluaran SKPD yang tepat. Pengajuan dana tambahan uang harus berdasarkan pada program dan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan belanja langsung. Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan

memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan. Jumlah dana tambahan uang yang diminta dalam SPP-TU harus dipertanggungjawabkan tersendiri dan apabila dana tambahan uang tersebut tidak habis digunakan oleh SKPD, maka sisa dari tambahan uang persediaan harus dikembalikan dan disetorkan ke kas umum daerah.

d. SPP Langsung (SPP-LS)

Merupakan SPP yang dipergunakan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh SKPD. Dalam hal ini, SPP-LS dapat digolongkan sebagai berikut.

- 1) SPP-LS gaji dan tunjangan Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan dilakukan oleh bendahara pengeluaran guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.
- 2) SPP-LS barang dan jasa

Dalam penerbitan SPP-LS barang dan jasa, PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran barang dan jasa.

3. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)

Dalam penerbitan SPM merupakan bagian yang penting dalam proses penatausahaan keuangan hal tersebut dapat dilakukan ketika dokumen SPP yang diajukan dinyatakan lengkap dan sah oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SPM. Penerbitan SPM paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen SPM. Apabila dokumen SPP yang diajukan tidak lengkap atau tidak sah, maka pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat menolak menerbitkan SPM. Penolakan penerbitan SPM paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP. Proses ini dilakukan mulai dengan pengujian atas SPM yang diajukan baik dari segi kelengkapan dokumen ataupun kebenaran pengisiannya. Untuk SPM GU dan TU, pengujian juga dilakukan atas SPJ yang diajukan oleh bendahara pengeluaran. Secara legal, penerbitan SPM adalah otorisasi dari pejabat pengguna anggaran, dimana tanda tangan dokumen SPM dilakukan oleh pengguna anggaran. Selanjutnya SPM yang telah ditandatangani diajukan kepada bendahara umum daerah yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencairan dana dengan menerbitkan SP2D. Penerbitan Surat Perintah

4. Pencairan Dana (SP2D)

Surat perintah pencairan dana adalah surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah SPM diterima

oleh BUD. SP2D ini bersifat spesifik, artinya satu SP2D hanya dibuat untuk satu SPM saja. SP2D dapat diterbitkan jika

- a. Pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia.
- b. Didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai peraturan perundang-undangan.

Sedangkan untuk waktu pelaksanaan penerbitan SP2D yaitu.

- a. Diterbitkan paling lambat 2 hari sejak SPM diterima
 - b. Apabila ditolak, dikembalikan 1 hari sejak diterima SPM.
5. Pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengeluaran

Dalam pertanggungjawaban keuangan SKPD, bendahara pengeluaran secara administratif mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan uang persediaan, dokumen laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran mencakup.

- a. Buku kas umum pengeluaran
- b. Ringkasan pengeluaran per rincian objek yang disertai dengan bukti pengeluaran yang sah
- c. Bukti penyetoran pajak PPN/PPh ke kas negara
- d. Register penutupan kas.

2.1.6. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Menurut Bastian, (2007:387), “laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menggambarkan selisih antara jumlah yang dianggarkan di awal periode dengan jumlah yang telah direalisasi di akhir periode”. Sedangkan menurut Mahsun, (2006:128), “laporan realisasi anggaran adalah laporan yang berisi tentang informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dari suatu entitas yang dibandingkan dengan anggaran ketiga pos tersebut”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan laporan realisasi anggaran adalah laporan yang disusun untuk memberikan informasi tentang realisasipendapatan, belanja dan pembiayaan dari suatu entitas yang secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk pemerintahan daerah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang kemudian dijabarkan dalam Permendagri 13 Tahun 2006, belanja diklasifikasikan berdasarkan jenis belanja sebagai belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Selanjutnya, kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari.

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai dalam kelompok belanja langsung tersebut dimaksudkan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja jenis ini antara lain belanja honorarium PNS, honorarium non PNS dan uang lembur. Termasuk honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/pembangunan.

2. Belanja Barang Dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja barang dan jasa ini mencakup belanja barang pakai habis, belanja bahan/material, belanja jasa kantor, belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja cetak/penggandaan, belanja sewa tempat, belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir, belanja sewa alat berat, belanja sewa belanja perlengkapan dan peralatan kantor, belanja makan minum, belanja pakaian dinas dan atributnya, belanja perjalanan dinas, belanja kursus pelatihan,

sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, belanja pemeliharaan, dan belanja jasa narasumber/tenaga ahli.

3. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk belanja modal pengadaan alat-alat angkut darat bermotor, belanja alat-alat pengolahan pertanian dan peternakan, belanja pengadaan peralatan kantor, belanja perlengkapan kantor, belanja pengadaan komputer, belanja pengadaan mebel, belanja modal pengadaan instalasi listrik dan telepon, belanja modal pengadaan buku dan belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset.

2.1.7. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Realisasi Anggaran

2.1.7.1. Dokumen Perencanaan

Dasar hukum dalam penyusunan dokumen perencanaan anggaran daerah mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut.

- a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah
- d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengertian dokumen menurut Sukoco (2007:134) adalah “informasi yang dikumpulkan dan bisa diakses serta digunakan”. Dokumen merupakan kumpulan data yang berbentuk nyata dan diperoleh berdasarkan sistem pengelolaan data. Pengertian perencanaan menurut Usman (2011:60) adalah “proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.” Sedangkan menurut Soekidjo (2003:36) “perencanaan adalah suatu kegiatan atau proses penganalisisan dan pemahaman sistem, penyusunan konsep dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuantujuan demi masa depan yang baik. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa dokumen perencanaan merupakan kumpulan data yang berisi tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan selama periode waktu tertentu.

Dokumen perencanaan anggaran memuat alokasi anggaran yang disediakan kepada pengguna anggaran. Alokasi anggaran pendapatan disebut estimasi pendapatan yang dialokasikan dan alokasi anggaran belanja disebut *lloiment*. Dokumen pelaksanaan anggaran di pemerintah

pusat disebut Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sedangkan di pemerintah daerah disebut

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD). Dengan diterbitkannya peraturan daerah tentang APBD, Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Dengan demikian maka fleksibilitas penggunaan anggaran diberikan kepada Pengguna Anggaran. DPA disusun secara rinci sampai dengan organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja disertai indikator kinerja. Dokumen ini disertai dengan rencana penarikan dana untuk mendanai kegiatan dan apabila dari kegiatan tersebut menghasilkan pendapatan maka rencana penerimaan kas juga dilampirkan. Kegiatan perencanaan dan penganggaran yang melibatkan seluruh unsur pelaksana yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah mulai dari penentuan program dan kegiatan, klasifikasi belanja, penentuan standar biaya, penentuan indikator kinerja dan target kinerja, sampai dengan jumlah anggaran yang harus disediakan, memerlukan perhatian yang serius bagi pimpinan satuan kerja perangkat daerah beserta pelaksana program dan kegiatan.

Dokumen anggaran juga harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Mardiasmo (2009:69) mengemukakan, Banyak faktor yang mempengaruhi dalam proses perencanaan anggaran antara lain; (1)

Tujuan dan target yang hendak dicapai, (2) Ketersediaan sumber daya (faktor-faktor produksi yang dimiliki pemerintah), (3) Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target, (4) faktor-faktor lainnya seperti munculnya peraturan pemerintah yang baru, fluktuasi pasar, perubahan sosial dan politik, bencana alam, kebijakan pemerintah juga dapat mempengaruhi anggaran.

2.1.7.2. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Widodo (2011:35) menjelaskan “kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai”. Wiley dalam Azhar (2007:11) menyatakan “sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut”.

Becker and Ulrich dalam Suparno (2005:24) menyatakan bahwa *competency refers to an individual's knowledge, skill, ability or personality characteristics that directly influence job performance*. Artinya, kompetensi mengandung aspek-aspek pengetahuan, keterampilan (keahlian) dan kemampuan ataupun karakteristik kepribadian yang mempengaruhi kinerja. Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2004, tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menjelaskan tentang sertifikasi kompetensi kerja sebagai suatu proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji

kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan atau Internasional

Menurut Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negeri Nomor: 46 Tahun 2003, tentang pengertian kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) telah membawa perubahan besar dan memberikan pendekatan baru dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Perubahan tersebut merupakan suatu perubahan yang bersifat paradigmatis, sementara perubahan yang lebih bersifat pragmatik, yaitu terkait dengan penatausahaan keuangan daerah. Perubahan itu sudah sampai pada teknik akuntansinya yang meliputi perubahan dalam pendekatan sistem akuntansi dan prosedur pencatatan, dokumen dan formulir yang digunakan, fungsi-fungsi otorisasi untuk tujuan sistem pengendalian intern, laporan, serta pengawasan. Perubahan tersebut membutuhkan dukungan teknologi dan sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai.

Menurut Tjiptoherijanto (2001:52), “untuk menilai kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumberdaya tersebut”. Tanggung jawab dapat dilihat dari atau tertuang dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumber daya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas.

Sejalan dengan berbagai pendapat yang dikemukakan diatas penulis menarik kesimpulan bahwa sumber daya manusia merupakan faktor penting demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Satuan Kerja Perangkat Daerah harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten terutama dalam bidang keuangan. Kompetensi sumber daya manusia dapat dilihat berdasarkan kualifikasi pendidikan yang sesuai, sertifikat pelatihan melalui ujian sertifikasi, deskripsi jabatan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.

2.2. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu terkait faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi anggaran antara lain.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Judul dan Peneliti	Metode Penelitian	Analisis Data	Hasil Penelitian
<p>Analisis Keterlambatan penyerapan anggaran belanja satuan kerja kementerian negara/lembaga TA 2010 di wilayah pembayaran KPPN Pekanbaru.</p> <p>Retno Miliasih (2012)</p>	<p>Analisis Kuantitatif Deskriptif</p>	<p><i>Cross Tabulation</i></p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan penyerapan anggaran belanja disebabkan oleh dua faktor yaitu: (1) kebijakan teknis, dan (2) kultur pengelolaan anggaran di satuan kerja.</p>
<p>Faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran belanja pada satuan kerja kementerian /lembaga di wilayah</p>	<p>Penelitian Eksploratori</p>	<p>a. Uji Validitas Instrumen b. Uji Reliabilitas Instrumen c. Uji Korelasi</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan penyerapan anggaran belanja disebabkan oleh lima faktor yaitu: (1) faktor perencanaan,</p>

Jakarta Hendris Herriyanto (2012)		antar Variabel	(2) faktor administrasi, (3) faktor sumber daya manusia, (4) faktor dokumen pengadaan, dan (5) faktor ganti uang persediaan.
Faktor-faktor penyebab terjadinya penumpukan realisasi anggaran belanja di akhir tahun anggaran pada satuan kerja di wilayah KPPN Kediri. Iwan Dwi Kuswoyo (2011)	Kuantitatif Deskriptif	Analisis Faktor Eksploratif (<i>Exploratory Factor Analysis-EFA</i>)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama penumpukan realisasi anggaran belanja di akhir tahun anggaran disebabkan oleh empat faktor utama yaitu : (1) faktor perencanaan, (2) faktor pelaksanaan anggaran, (3) faktor pengadaan barang/jasa, dan (4) faktor internal satker.

2.3. Kerangka Konseptual

Menurut teori kontijensi menyatakan bahwa tidak ada rancangan dan penggunaan sistem pengendalian manajemen yang dapat diterapkan secara efektif untuk semua kondisi organisasi, namun sebuah sistem pengendalian tertentu hanya efektif untuk situasi atau organisasi atau perusahaan tertentu. “Kesesuaian antara sistem pengendalian manajemen dan variabel kontekstual organisasi dihipotesiskan untuk menyimpulkan peningkatan kinerja organisasi dan individu yang terlibat didalamnya” (Otley 1980; Fisher 1998 dalam Adrianto, 2008:27).

Dalam kerangka konseptual penelitian ini, pendekatan kontijensi mengungkapkan bahwa perencanaan dan penggunaan desain sistem pengendalian manajemen tergantung pada karakteristik organisasi dan kondisi lingkungan di mana sistem tersebut ditetapkan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan teori kontijensi yaitu dokumen perencanaan yang erat kaitannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi anggaran belanja. Mempersiapkan dokumen perencanaan anggaran yang lengkap dan memadai akan mempengaruhi realisasi anggaran belanja. Sehingga tidak ada anggaran belanja yang harus direvisi. Pengajuan penyusunan anggaran yang tidak disertai dokumen pendukung yang memadai menyebabkan anggaran yang diajukan diberi tanda bintang. Hal ini mengakibatkan revisi dan penghilangan anggaran bertanda bintang tersebut memerlukan proses yang memakan waktu. Lebih parah lagi apabila revisi anggaran dilakukan beberapa kali, sehingga mengakibatkan proses penyerapan belanja yang terhambat.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hendris Herryanto (2012:60) bahwa anggaran kegiatan yang diblokir, terlambatnya pengesahan dokumen pengumuman lelang mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran belanja pada satuan kerja Kementerian/Lembaga di wilayah Jakarta. Jika dalam teori Stewardship hal itu digambarkan seperti hubungan antara pemegang saham (*principal*) dan manajer (*steward*). Teori ini memiliki asumsi bahwa kepentingan personal antara manajer dan pemegang saham dapat diselaraskan melalui pencapaian tujuan organisasi. Begitu juga hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dan realisasi anggaran dapat diselaraskan melalui tujuan organisasi yang hendak dicapai. Sumber daya manusia yang kompeten diharapkan dapat bekerja secara profesional untuk merealisasikan anggaran secara proporsional.

Sehingga program kegiatan yang tertera dalam dokumen perencanaan dapat terlaksana sesuai jadwal. Terlaksananya program kegiatan sesuai jadwal dapat meminimalisir penumpukan anggaran pada akhir tahun. Sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana kompetensi sumber daya manusia sebagai *steward* yang termotivasi pada *principal* (realisasi anggaran belanja).

Pada teori stewardship didasarkan pada pelayan yang memiliki perilaku yang dibentuk agar selalu dapat diajak bekerjasama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individunya dan selalu bersedia untuk melayani. Pada teori stewardship terdapat suatu

pilihan antara perilaku *self serving* dan *pro organisational*, perilaku tersebut tidak akan dipisahkan dari kepentingan organisasi. .

Mengacu pada teori *stewardship* diatas, pada penelitian ini menekankan pada kompetensi sumber daya manusia yang erat kaitannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi anggaran belanja. Menurut Mangkunegara(2012:40) “kompetensi sumber daya manusia adalah kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya”. Perubahan besar dalam pengelolaan keuangan pemerintah membutuhkan dukungan teknologi dan sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Kompetensi sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap kinerja. Seseorang yang tidak memiliki kompetensi, akan berpengaruh terhadap kinerja yang buruk. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Hendris Herriyanto (2012:61), “Sumber daya manusia pelaksana yang kurang kompeten, rangkap tugas dalam jabatan panitia pengadaan dan tidak memiliki sertifikat pelatihan berpengaruh terhadap keterlambatan penyerapan anggaran”

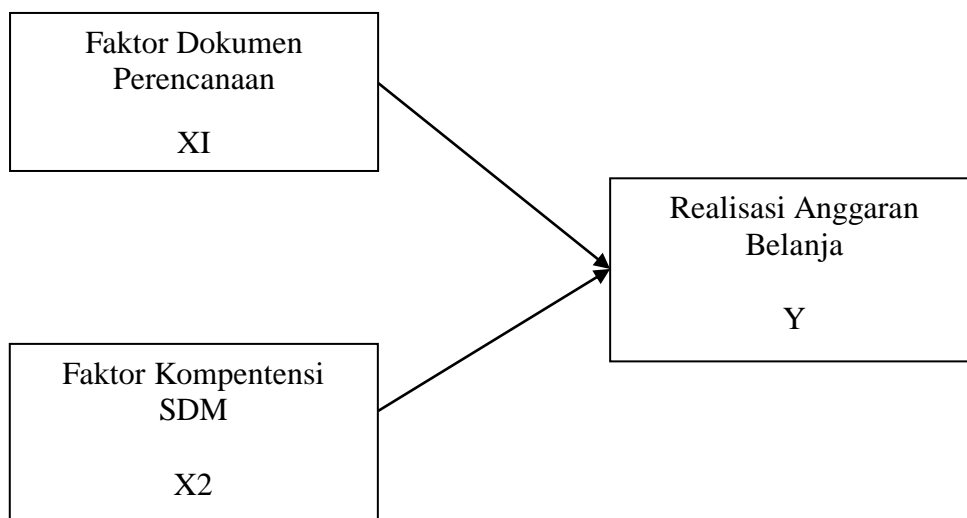
Agar keterlambatan penyerapan anggaran dapat dihindari diharapkan sumber daya manusia dalam hal ini pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah memiliki kemauan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dan ujian sertifikasi sehingga pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut memiliki kompetensi yang memadai. Kemauan dan keinginan untuk mengikuti ujian

sertifikasi dalam TPB merupakan unsur norma subjektif dimana keyakinan individu terhadap harapan normatif ini nantinya akan menjadi rujukan, teman, atasan, dan motivasi untuk mencapai harapan tersebut.

Berdasarkan kajian teoritis sebagaimana telah dipaparkan diatas, maka dalam penyusunan penelitian ini penulis mengajukan kerangka konseptual sebagai berikut.

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual



2.4. Pengembangan Hipotesis

Menurut Djarwanto PS dan Pangestu Subagyo (1994:183) “hipotesis adalah pernyataan mengenai sesuatu hal yang harus diuji kebenarannya, untuk bisa membuktikan benar atau tidaknya pernyataan ini diperlukan penelitian dan analisis”.

2.4.1. Faktor Dokumen Perencanaan terhadap Realisasi Anggaran Belanja

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Terdapat hubungan yang erat antara anggaran, perencanaan dan pengendalian, dimana perencanaan digunakan untuk melihat kedepan terkait dengan tindakan apa yang seharusnya diambil untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Setiap kementerian dan lembaga terlebih dahulu melakukan penelaahan atas perencanaan terkait dengan program dan kegiatan yang terdapat dalam APBN.

Begitu juga pada Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan penelaahan terhadap dokumen perencanaan terkait dengan program yang terdapat dalam APBD. Penelaahan yang dilakukan tersebut untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut telah sesuai dengan kebutuhan tahun anggaran berjalan. Sehingga tidak ada anggaran kegiatan yang diblokir yang mengakibatkan anggaran tidak dapat dicairkan. Sehingga akan mempengaruhi realisasi anggaran belanja yang menumpuk diakhir tahun. Penelitian yang dilakukan oleh Hendris Herriyanto (2012:63) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran belanja pada satuan kerja Kementerian/Lembaga di wilayah Jakarta memberikan hasil bahwa perencanaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keterlambatan penyerapan anggaran. Item pembentuk faktor

perencanaan adalah anggarankegiatan diblokir, SK panitia lelang terlambat ditetapkan, terlambatnya penyusunan jadwal pelaksanaan lelang, terlambatnya dalam pengesahan dokumen pengumuman lelang, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran perlu direvisi karena tidak sesuai dengan kebutuhan, dan pelaksanaan kegiatan/proyek tidak melihat rencana/jadwal yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran .

Begitu juga dalam penelitian ini penulis ingin menguji apakah faktor dokumen perencanaan mempengaruhi realisasi anggaran. Ketika dokumen perencanaan lengkap dan pemenuhan dokumen tepat waktu, maka uang persediaan akan dapat segera cair. Uang persediaan tersebut nantinya dapat digunakan untuk membiayai program kegiatan yang tercantum dalam DPA, sehingga program kegiatan dalam DPA dapat dilaksanakan sesuai jadwal dan anggaran dapat terealisasi secara proporsional. Berdasarkan tinjauan teori dan tinjauan empiris, maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut.

H1: Faktor dokumen perencanaan berpengaruh terhadap realisasi anggaran belanja.

2.4.2. Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Realisasi Anggaran Belanja

Salah satu faktor utama yang menentukan baik atau tidak jalannya roda pemerintahan adalah sumber daya manusia. Hal ini terlihat dari bagaimana manusia sebagai tenaga kerja menggunakan potensi fisik dan psikis yang ia miliki secara maksimal dalam mencapai tujuan organisasi (lembaga).

Pemerintah serta struktur dibawahnya sebaiknya mampu mewujudkan impian masyarakat melalui pembangunan daerah, karena pemerintah yang memiliki jabatan dan kuasa sebagai pengelola keuangan memiliki peran penting guna perwujudan harapan masyarakat. Fungsi pemerintah sebagai SDM dapat diwujudkan dalam prakteknya melalui kegiatan pemerintah sebagai pengelola keuangan negara dalam penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Penelitian yang dilakukan oleh Hendris Herriyanto (2012:70) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran belanja pada satuan kerja Kementerian/Lembaga di wilayah Jakarta memberikan hasil bahwa sumber daya manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keterlambatan penyerapan anggaran. Dengan item pembentuk faktor sumber daya manusia antara lain: SDM pelaksana kurang kompeten, rangkap tugas dalam jabatan panitia pengadaan, ketakutan pejabat untuk melaksanakan pengadaan akibat pemberitaan penangkapan pejabat atas tuduhan korupsi, keengganan untuk menjadi pejabat pengadaan karena tidak seimbangnya resiko pekerjaan dengan imbalan yang diterima, dan SK penunjukan panitia pelaksana kegiatan swakelola belum ditetapkan. Dalam penelitian ini penulis ingin menguji apakah faktor kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap realisasi anggaran belanja. Karena pegawai yang kompeten dan ahli dibidang penatausahaan keuangan, akan mempengaruhi dalam merealisasikan anggaran belanja. Pegawai yang cakap dalam penyusunan anggaran dan program kegiatan yang tepat, akan lebih mudah untuk

merealisasikan anggaran agar dapat terealisasi secara proporsional. Sehingga anggaran yang menumpuk diakhir tahun dapat dihindari. Berdasarkan tinjauan teori dan tinjauan empiris, maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut.

H2: Faktor kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap realisasi anggaran belanja.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Obyek Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan kerangka pemikiran yang diruakan pada bab sebelumnya, maka yang menjadi obyek penelitian adalah Pengaruh Dokumen Perencanaan (X1) Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2) dan Realisasi Anggaran Belanja (Y). Penelitian ini di laksanakan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato yang berlangsung selama kurun waktu \pm 3 (tiga) bulan, Nopember 2022 sampai dengan Februari .

3.2. Populasi dan Sampel

3.2.1. Populasi

Menurut Sugiyono (2004:72) “populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pejabat struktural, pegawai pengelola keuangan dan kegiatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato dengan jumlah populasi sebanyak 52 pegawai.

3.2.2. Sampel

Sugiyono (2004:73) berpendapat bahwa “sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi”. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah pejabat struktural, pegawai pengelola keuangan dan kegiatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato . Sehingga

penelitian ini disebut penelitian populasi. Sesuai pernyataan Sabar (2007:41) “apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi atau studi populasi atau study sensus”.

3.3. Jenis dan Sumber Data

3.3.1. Jenis Data

Berdasarkan sifatnya, penulis menggunakan dua jenis data sebagai berikut.

1. Data Kuantitatif adalah data yang dapat dihitung atau data yang dapat berupa angka-angka. Dalam penelitian ini data berupa laporan realisasi anggaran belanja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato.
2. Data Kualitatif adalah data yang tidak dapat dihitung atau data yang bersifat kualitatif, berupa perkembangan organisasi, struktur organisasi, dan data data lain yang berhubungan dengan penyusunan penelitian ini.

3.3.2. Sumber Data

Adapun data yang telah dikumpulkan oleh penulis dikelompokkan berdasarkan sumbernya yaitu.

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data” (Sugiyono, 2004:29). Data primer diperoleh secara langsung dari daerah penelitian atau data yang berasal dari sumber asli yang dikumpulkan secara khusus untuk keperluan penelitian yang

dilakukan. Dalam penelitian ini data primer berupa laporan realisasi anggaran belanja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato.

2. Data Sekunder

“Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul” (Sugiyono, 2004:29). Data sekunder dikumpulkan dari sumber lain yang berguna untuk memperkuat data yang disajikan pada data primer. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu jurnal-jurnal ilmiah, dokumen-dokumen perusahaan, literature, serta artikel yang relevan dengan objek penelitian.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah.

3.4.1. Riset Lapangan (*field research*)

Yaitu mengumpulkan data-data primer dengan datang langsung ke Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato kemudian melakukan.

1. Wawancara, dengan menanyakan secara langsung kepada pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato yang terkait guna pengumpulan data yang diperlukan dalam penulisan usulan penelitian ini.
2. Observasi, dengan mengadakan peninjauan secara langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang berhubungan dengan proses realisasi anggaran belanja.
3. Kuesioner, dengan pertanyaan tertutup berupa suatu daftar pertanyaan yang diberikan atau disebarkan kepada responden untuk diisi berdasarkan persepsi masing-masing responden dari SKPD Dinas

Pendidikan Kabupaten Pohuwato dengan menggunakan skala *Likert*. Jawaban skala *Likert* dalam penelitian ini terdiri dari lima pilihan, yakni : Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Kurang Setuju (KS), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). Pemberian nilai (*scoring*) untuk jawaban Sangat Setuju (SS) diberikan nilai 5, dan seterusnya menurun sampai pada jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) yang diberikan nilai 1.

3.4.2. Riset Pustaka (*library research*)

Yaitu dengan mempelajari buku-buku dan tulisan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas, serta melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen yang mendukung penelitian.

3.5. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.5.1. Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel yang harus ditetapkan dengan jelas oleh seorang peneliti agar dalam pengumpulan data dapat terarah sesuai dengan tujuan penelitian. “Variabel adalah suatu konsep yang memiliki dua nilai atau lebih data suatu permasalahan” (Rumidi, 2002:10). Penelitian ini

terdapat variabel bebas dan variabel terikat. Adapun penjabarannya sebagai berikut.

1. Variabel Bebas (*Independent Variabel*)

“Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat” (Sugiyono,

2004:39) Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah faktor dokumen perencanaan dan faktor kompetensi sumber daya manusia.

2. Variabel Terikat (Dependent Variabel)

“Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas” (Sugiyono, 2004:40). Dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah realisasi anggaran belanja.

3.5.2. Definisi Operasional

Realisasi anggaran belanja merupakan tindakan menindaklanjuti rencana anggaran sesuai dengan alokasi dana yang telah tertuang di dalam APBD, anggaran dapat terserap secara maksimal ataupun tidak. Saat ini di Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato mengalami realisasi anggaran yang rendah di awal tahun. Realisasi anggaran yang rendah di awal tahun ini disebabkan selain karena tidak dijalankannya program-program yang sudah direncanakan mengingat anggaran yang besar sudah disetujui dan juga karena adanya kemungkinan dalam pelaksanaan program terdapat beberapa hambatan yang dapat menunda terselesaikannya program sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Pada penelitian ini akan dilihat apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat realisasi anggaran belanja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato.

1. Faktor Dokumen Perencanaan

Perencanaan program kerja dan kegiatan menjadi satu kesatuan dengan perencanaan anggaran, sehingga program kerja dan kegiatan

yang direncanakan akan sesuai dengan kemampuan pembiayaan yang tersedia. Oleh karena itu perencanaan pembangunan daerah harus dilengkapi dengan dokumen perencanaan. Berkaca pada sistem penganggaran yang sedang kita laksanakan saat ini (yang menghasilkan produk dokumen anggaran/RKA-SKPD) dan sistem perencanaan (yang menghasilkan produk dokumen perencanaan DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah) maka, kedua produk tersebut harusnya ada benang merah secara substansi. Apa yang tertuang dalam dokumen perencanaan beserta informasi di dalamnya (*outcome* dan indikator kinerja pada tingkat program/kegiatan) seharusnya dapat dioperasionalkan dalam dokumen penganggaran. Hal tersebut tidak terlihat selama ini, dikarenakan masih sering terjadi adanya anggaran kegiatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah sehingga menyebabkan perencanaan-perencanaan yang tertuang didalam dokumen perencanaan perlu dilakukan revisi. Jadi dapat dikatakan bahwa keterkaitan yang ada pada kedua dokumen tersebut hanya sebatas pada nama program dan kegiatan. Dari pernyataan tersebut maka faktor dokumen perencanaan memiliki hubungan dengan realisasi anggaran belanja. Pada penelitian ini akan dilihat apakah dokumen perencanaan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran atau tidak. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert lima poin dengan butir pertanyaan sebanyak delapan pertanyaan dalam sebuah kuesioner.

2. Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia juga merupakan potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan tujuannya. Kompetensi sumber daya manusia memiliki hubungan erat dengan perencanaan, dimana terdapat tujuan dari perencanaan yang telah dibuat baik untuk kepentingan individu, kepentingan organisasi, dan kepentingan nasional (dalam hal ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah). Kompetensi sumber daya manusia memiliki hubungan yang erat dengan realisasi anggaran belanja. Sumber daya manusia sangat diperlukan sebagai pelaksana dan pengelola kegiatan yang kompeten serta panitia pejabat/pelaksana pengadaan barang dan jasa sebaiknya memiliki sertifikat dan berkompotensi karena jika pegawai dalam suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pelaksana pengadaan barang dan jasa kurang berkompoten dan tidak memiliki sertifikat maka dapat menyebabkan pelaksanaan atas pengadaan barang dan jasa tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Bukan hanya itu saja pelaksana dan pengelola kegiatan yang melaksanakan tugas lebih dari satu (rangkap tugas) juga mempengaruhi kualitas pekerjaan dalam merealisasikan anggaran. Adanya pejabat dan pegawai pengelola kegiatan yang sering mengalami mutasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat mempengaruhi kesinambungan rencana program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta belum diterapkannya mekanisme *reward* dan *punishment* terhadap pegawai juga

mempengaruhi dalam pencapaian realisasi anggaran belanja. Sumber daya manusia memiliki pengaruh terhadap realisasi anggaran belanja. Sehingga faktor kompetensi SDM menjadi salah satu variabel independen pada penelitian ini. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert lima poin dengan butir pertanyaan sebanyak delapan pertanyaan dalam sebuah kuesioner.

3.6. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel dalam penelitian ini adalah kuesioner. Skala pengukuran kuesioner ini menggunakan skala likert 1 – 5 poin sebagai berikut.

1. Skala 1 mengindikasikan sangat tidak setuju.
2. Skala 2 mengindikasikan tidak setuju.
3. Skala 3 mengindikasikan kurang setuju.
4. Skala 4 mengindikasikan setuju.
5. Skala 5 mengindikasikan sangat setuju.

Skala ini digunakan untuk memperoleh derajat persepsi responden atas setiap pertanyaan yang tercermin dalam skala yang dipilih. Pengukuran instrumen dalam penelitian ini dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas.

3.6.1. Uji Validitas

“Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen atau suatu test” (Arikunto, 2006:151). Validitas alat ukur uji dengan menghitung korelasi antara nilai

yang diperoleh dari setiap butir pertanyaan dengan kesulitan yang diperoleh pada alat ukur tersebut.

Untuk mengukur validitas item atau butir soal dapat digunakan rumus *korelasi product moment dari Karl Pearson*, yang terdiri dari korelasi product moment dengan simpangan dan *korelasi product moment* dengan angka kasar. Nilai korelasi (r) dibandingkan dengan angka kritis dalam tabel korelasi. Untuk menguji koefisien korelasi ini digunakan *level of signifikan 5%*. Jika r hitung $> r$ tabel maka butir soal tersebut valid. Sebaliknya jika r hitung $< r$ tabel soal tersebut tidak valid. Pengujian validitas butir soal dalam penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS for windows 17.

3.6.2. Uji Reliabilitas

Persyaratan pokok kedua yang harus dipenuhi agar alat ukur dikatakan baik yaitu reliabilitas. Angket dikatakan reliabel apabila angket dapat dipercaya untuk digunakan sebagai syarat pengumpulan data, semakin tinggi reliabelnya maka semakin baik pula alat ukur tersebut. Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengukur sejauh mana hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran diulang dua kali atau lebih.

Untuk menguji reliabilitas instrumen ini penulis menggunakan aplikasi SPSS 17 dengan metode *Cronbach Alpha*. Suatu konstruksi atau variabel dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* $> 0,70$. maka butir

3.7. Analisis Data

3.7.1. Uji Normalitas

“Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak” (Ghozali, 2011:69). Uji normalitas residual dilakukan dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov test dengan taraf signifikan 5%. Dasar pengambilan keputusan nilai Sig = 0,05 maka dikatakan berdistribusi normal. Jika nilai Sig < 0,05 maka dikatakan berdistribusi tidak normal. Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan bantuan SPSS *for windows* 17.

3.7.2. Analisis Regresi Linier Berganda

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan alat analisis statistik yakni analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh faktor dokumen perencanaan (X1) dan faktor kompetensi SDM (X2), terhadap realisasi anggaran belanja (Y). Analisis regresi ganda menggunakan rumus sebagai berikut.

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = realisasi anggaran belanja

a = Konstanta

X1 = faktor dokumen perencanaan

X2 = faktor kompetensi SDM

b1, b2 = Koefisien regresi untuk X1, X2

$e = \text{error term}$

Sementara itu untuk menilai ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual penelitian ini akan menilai *goodnes of fit* suatu model. Penilaian ini dapat diukur dari nilai koefisien determinasi (R^2), nilai statistik F, dan nilai statistik t.

3.7.3. Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi ini adalah antara nol dan satu ($0 < R^2 < 1$). Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel terikat sangat terbatas.

Nilai yang hampir mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen.

3.7.4. Uji F

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas signifikansi lebih besar dari 0,05 (α), maka variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika lebih kecil dari 0,05 maka variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Langkah pertama menentukan formulasi H_0 dan H_1 , dimana $H_0 = b_1 = b_2 = 0$, berarti tidak ada pengaruh faktor dokumen perencanaan dan

faktorkompetensi SDM terhadap realisasi anggaran belanja. $H_1 \neq b_1 \neq b_2 \neq 0$, berarti terdapat pengaruh faktor dokumen perencanaan dan faktor kompetensi SDM terhadap realisasi anggaran belanja. Kemudian melakukan kriteria pengujian Uji F (H_0 diterima apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$).

3.7.5. Uji Statistik t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa besar pengaruh atau variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Kriteria pengujian dilakukan berdasarkan probabilitas signifikansi lebih kecil dari 0,05 (α), maka variabel independen secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen. Namun jika probabilitas signifikansi lebih besar dari 0,05 (α), maka variabel independen secara individu tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Deskripsi Data

4.1.1. Karakteristik Responden

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara mengantarkan langsung kuesioner kepada responden di Dinas Pendidikan Di Kabupaten Pohuwato Kuesioner yang disebar sebanyak 58 yaitu sejumlah pegawai penatausahaan keuangan dan pengelola kegiatan yang meliputi pejabat struktural, pejabat pengguna anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Staf pengelola keuangan dan kegiatan. Tahap pengumpulan data dilakukan sejak tanggal. Dari 58 kuesioner yang disebarkan, sebanyak 54 kuesioner yang kembali (89,66%). Dari 54 kuesioner yang kembali tersebut sebanyak 46 dapat diolah (86,21%), sedangkan 2 kuesioner tidak dapat diolah (3,45%). Kuesioner tidak dapat diolah karena responden tidak mengisi secara lengkap seluruh pertanyaan yang diajukan. Distribusi kuesioner dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1 Distribusi Kuesioner

No	Keterangan	Jumlah Kuesioner	Persentase (%)
1	Kuesioner yang disebar	58	100
2	Kuesioner yang kembali	54	89,66
3	Kuesioner yang tidak kembali	2	3,45

4	Kuesioner yang tidak dapat diolah	2	3,45
5	Kuesioner yang diolah	50	86,21

4.1.2. Demografi Responden

Dari 58 kuesioner yang diolah dapat diketahui mengenai demografi responden yaitu jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir, lama bekerja dan jabatan. Rincian demografi responden dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2 Demografi Responden

Keterangan	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin		
1. Laki-laki	36 orang	62,07%
2. Perempuan	22 orang	37,93%
Umur		
1. 18 – 30 tahun	- orang	-%
2. 31 – 40 tahun	18 orang	31,03%
3. 41 – 50 tahun	23 orang	39,66%
4. = 51 tahun	17 orang	29,31%
Pendidikan terakhir		
1. SMA	6 orang	10,34%
2. D III	- orang	-
3. S1/D IV	43 orang	74,14%
4. S2	9 orang	15,52%

Lama bekerja	- orang	-%
1. - 5 tahun	4 orang	6,89%
2. 6 - 10 tahun	39 orang	67,24%
3. 11- 20 tahun	9 orang	15,52%
4. 21-30 tahun	6 orang	10,35%
5. - 31 tahun		
Jabatan		
1. Pejabat Struktural	9 orang	15,52%
2. Staf	49 orang	84,48%

Tabel Demografi Responden di atas menunjukkan, bila dari segi jenis kelamin dari 58 responden sebanyak 36 orang atau 62,07% berjenis kelamin laki-laki sementara 22 orang atau 37,93% berjenis kelamin perempuan. Dari segi umur, - orang atau - % berusia 18-30 tahun, 18 orang atau 31,07% berusia 31-40 tahun, 23 orang atau 39,66% berusia 41-50 tahun dan 12 orang atau 29,31% berusia diatas 51 tahun.

Dilihat pendidikan terakhirnya, dari 58 responden sebanyak 6 orang atau 7,46% memiliki jenjang pendidikan SMA, - orang atau -% , 48 orang atau 74,14% memiliki jenjang pendidikan S1 dan 11 orang atau 15,52% % memiliki jenjang pendidikan S2. Dari segi lama bekerja - orang atau -% memiliki pengalaman bekerja selama kurang dari 5 tahun, 4 orang atau 6,89% memiliki pengalaman bekerja selama 6-10 tahun, 39 orang atau 67,24% memiliki pengalaman bekerja selama 11-20 tahun, 9 orang atau 15,52% memiliki pengalaman bekerja selama 21-30 tahun, dan 6 orang atau

10,35% memiliki pengalaman bekerja selama lebih dari 31 tahun. Sementara itu bila dilihat dari jabatan dalam struktur organisasi sebanyak 9 orang atau 15,52% sebagai pejabat struktural, 49 orang atau 84,48% sebagai staf.

4.2. Analisis Data

4.2.1. Hasil Uji Kualitas Data

4.2.1.1. Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrument. Uji validitas dilakukan dengan melakukan korelasi *bivariate* antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk.

Pengujian validitas ini dengan menggunakan *pearson correlation* program IBM SPSS 17. berikut.

Hasil uji validitas pada tiga variabel dalam penelitian ini adalah sebagai

1. Faktor Dokumen Perencanaan (Variabel X1)

Tabel 4.3.

Hasil Uji Validitas Variabel Faktor Dokumen Perencanaan

Variabel	Item	Validitas		
		<i>Pearson Correlation</i>	<i>r Table</i>	Keterangan
X1	Dokumen Perencanaan 1	0,564	0,203	Valid
	Dokumen Perencanaan 2			
	Dokumen Perencanaan 3	0,598	0,203	Valid
	Dokumen Perencanaan 4			

		0,437	0, 203	Valid
		0,619	0,203	Valid
	Dokumen Perencanaan 5	0,565	0, 203	Valid
	Dokumen Perencanaan 6	0,787	0, 203	Valid
	Dokumen Perencanaan 7	0,616	0, 203	Valid
	Dokumen Perencanaan 8	0,560	0, 203	Valid

Sumber : Hasil olah data (2023) melalui program SPSS 17.

Hasil uji validitas variabel faktor dokumen perencanaan (X1) didapatkan hasil bahwa dari 8 butir item pernyataan untuk variabel faktor dokumen perencanaan (X1) semuanya valid. Hal ini ditunjukkan oleh hasil perhitungan diperoleh nilai r hitung lebih besar dari r tabel (0,203), dengan demikian butir pernyataan untuk mengungkap tentang faktor dokumen perencanaan (X1) layak dipergunakan sebagai instrument penelitian.

2. Kompetensi Sumber Daya Manusia(Variabel X2)

Tabel 4.4.

Hasil Uji Validitas Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia

Variabel	Item	Validitas		
		<i>Pearson Correlation</i>	<i>r Table</i>	Keterangan
X2	Kompetensi Sumber Daya Manusia 1	0,437	0,203	Valid
	Kompetensi Sumber Daya Manusia 2	0,584	0, 203	Valid
	Kompetensi Sumber Daya Manusia 3	0,511	0, 203	Valid
	Kompetensi Sumber Daya Manusia 4	0,707	0, 203	Valid
	Kompetensi Sumber Daya	0,466	0, 203	Valid

	Manusia 5			
	Kompetensi Sumber Daya Manusia 6	0,714	0, 203	Valid
	Kompetensi Sumber Daya Manusia 7	0,531	0, 203	Valid
	Kompetensi Sumber Daya Manusia 8	0,702	0, 203	Valid

Sumber : Hasil olah data.

Hasil uji validitas variabel faktor kompetensi sumber daya manusia (X2) didapatkan hasil bahwa dari 8 butir item pernyataan untuk variabel faktor kompetensi sumber daya manusia (X2) semuanya valid. Hal ini ditunjukkan oleh hasil perhitungan diperoleh nilai r hitung lebih besar dari r tabel (0,203), dengan

demikian butir pernyataan untuk mengungkap tentang faktor kompetensi sumber daya manusia (X2) layak dipergunakan sebagai instrument penelitian.

3. Realisasi Anggaran Belanja (Variabel Y)

Tabel 4.5.

Hasil Uji Validitas Variabel Realisasi Anggaran Belanja

Variabel	Item	Validitas		
		<i>Pearson Correlation</i>	<i>r Table</i>	Keterangan
Y	Realisasi Anggaran Belanja 1	0,721	0,203	Valid
	Realisasi Anggaran Belanja 2	0,803	0, 203	Valid
	Realisasi Anggaran Belanja 3	0,756	0, 203	Valid
	Realisasi Anggaran Belanja 4	0,764	0, 203	Valid

Sumber : Hasil olah data

Hasil uji validitas variabel realisasi anggaran belanja (Y) didapatkan hasil bahwa dari 4 butir item pernyataan untuk variabel realisasi

anggaran belanja (Y) semuanya valid. Hal ini ditunjukkan oleh hasil perhitungan diperoleh nilai r hitung lebih besar dari r tabel (0,203), dengan demikian butir pernyataan untuk mengungkap tentang realisasi anggaran belanja (Y) layak dipergunakan sebagai instrument penelitian.

4.2.1.2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah kepercayaan atau ketetapan suatu tes, apabila diteskan terhadap subyek yang sama. Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan pengujian *Cronbach Alpha* (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan *reliable* jika memberikan nilai Cronbach Alpha $> 0,70$. Hasil uji reliabilitas pada tiga variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas Masing-Masing Variabel

Variabel	Reliabilitas	
	<i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
Faktor dokumen perencanaan	0,740	Reliabel
Faktor kompetensi SDM	0,723	
Realisasi Anggaran Belanja	0,759	

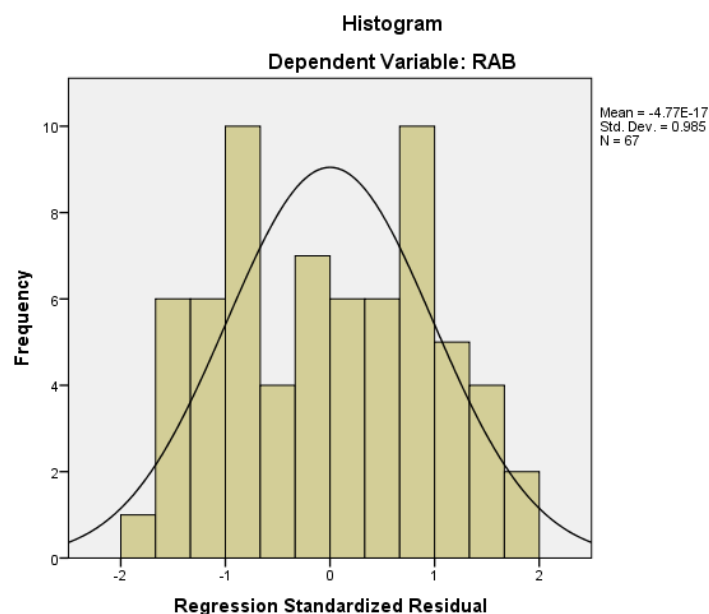
Sumber : Hasil olah data melalui program IBM SPSS 17.

Dari tabel diatas dapat dilihat hasil uji reliabilitas koefisien *Cronbach's Alpha* untuk variabel faktor dokumen perencanaan, faktor kompetensi sumber daya manusia dan realisasi anggaran belanja. masing-masing sebesar 0,740; 0,723 dan 0,759, seluruhnya lebih besar dari 0,70. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa instrumen variabel ini reliabel (dapat diandalkan) sebagai alat pengukur variabel penelitian.

4.2.2. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Dalam penelitian ini uji normalitas dengan pendekatan OLS yaitu data residual yang dibentuk model regresi linear terdistribusi normal, bukan variabel bebas ataupun variabel terikatnya. Kriteria sebuah data residual terdistribusi normal atau tidak dengan pendekatan grafik histogram dan normal P-P Plot dengan melihat sebaran titik-titik yang ada pada gambar. Apabila sebaran titik-titik tersebut mendekati atau rapat pada garis lurus (diagonal) maka dikatakan bahwa (data) residual terdistribusi normal, namun apabila sebaran titik-titik tersebut menjauhi garis maka tidak terdistribusi normal. Berikut ini gambar grafik histogram dan normal P-P Plot hasil uji normalitas.

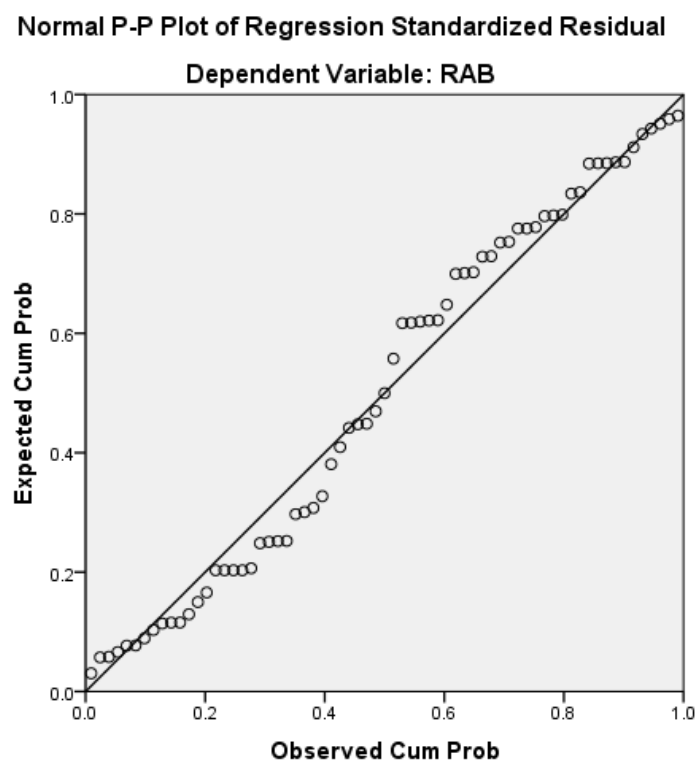
Gambar 4.2 Grafik Histogram Uji Normalitas



Sumber : Hasil olah data

Dengan melihat tampilan grafik histogram di atas dapat disimpulkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang normal, tidak menyimpang ke kiri maupun ke kanan. Oleh karena itu model regresinya telah memenuhi asumsi normalitas.

Gambar 4.3 Normal P-P Plot Uji Normalitas



Sumber : Hasil olah data

Berdasarkan gambar normal *probability plot* di atas dapat disimpulkan bahwa telah berpola distribusi yang normal, karena sebaran titik-titik tersebut mendekati atau rapat pada garis lurus (diagonal). Oleh karena itu model regresinya telah memenuhi asumsi normalitas.

4.2.3. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh dokumen perencanaan dan kompetensi sumber daya manusia terhadap realisasi anggaran belanja. Adapun model persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut.

$$Y = a + b_1.X_1 + b_2.X_2$$

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda dengan program *SPSS 17* diperoleh hasil sebagai berikut

Tabel 4.7 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien	t _{hitung}	Signifikansi
Konstanta	2,216		
Faktor Dokumen Perencanaan	0,206	3,733	0,000
Faktor Kompetensi SDM	0,199	3,624	0,001
R ²	0,617		
F Statistik	54,188		0,000

Sumber : Hasil olah data

Berdasarkan hasil regresi diatas, maka dapat disusun persamaan sebagai berikut.

$$Y = 2,216 + 0,206.X_1 + 0,199.X_2$$

Interpretasi dari persamaan tersebut adalah.

a = 2,216, berarti jika skor faktor dokumen perencanaan dan faktor kompetensi sumber daya manusia dianggap 0 atau tidak ada, maka realisasi anggaran belanja hanya sebesar 2,216.

b₁ = 0,206, berarti jika skor faktor dokumen perencanaan meningkat satu poin maka realisasi anggaran belanja akan meningkat sebesar 0,206 sehingga asumsinya realisasi anggaran belanja semakin meningkat

(dengan asumsi faktor kompetensi sumber daya manusia dianggap konstan).

$b_2 = 0,199$, berarti jika skor faktor kompetensi sumber daya manusia meningkat satu poin maka realisasi anggaran belanja akan meningkat sebesar 0,199 sehingga asumsinya realisasi anggaran belanja semakin meningkat (dengan asumsi faktor dokumen perencanaan dianggap konstan).

4.2.4. Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya adalah mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil pengujian koefisien determinasi (R^2) dalam penelitian ini diperoleh nilai sebesar 0,617 (lampiran 7). Angka koefisien determinasi ini menyatakan bahwa besarnya pengaruh variabel faktor dokumen perencanaan dan faktor kompetensi sumber daya manusia adalah sebesar 61,7%, sedangkan sisanya sebesar 38,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

4.3. Pengujian Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan aplikasi SPSS 17.

4.3.1. Hasil Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh faktor dokumen perencanaan dan faktor kompetensi SDM secara bersama-sama terhadap

realisasi anggaran belanja. Prosedur perhitungan uji F adalah sebagai berikut.

1. Menentukan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a)

$H_0 = b_1 = b_2 = 0$ (tidak terdapat pengaruh faktor dokumen perencanaan dan faktor kompetensi SDM secara bersama-sama terhadap realisasi anggaran belanja).

$H_a = b_1 \neq b_2 \neq 0$ (terdapat pengaruh faktor dokumen perencanaan dan faktor kompetensi SDM secara bersama-sama terhadap realisasi anggaran belanja)

2. Menentukan *level of significance* (α) = 5%

3. Menentukan F tabel dengan derajat kebebasan (df) = $k; N-k-1$ Dimana k adalah jumlah variabel bebas dan N adalah jumlah sampel, sehingga F tabel = 0,05 (2;64) adalah 3,14

4. Kriteria pengujian H_0 diterima apabila F hitung = 3,14 H_0 ditolak apabila F hitung > 3,14

5. Menghitung nilai F Perhitungan uji F menggunakan SPSS 23 *for windows* memperoleh nilai F sebesar 54,188 dengan nilai $p\text{-value} = 0,000$

6. Kesimpulan

Dari hasil uji F diketahui bahwa F hitung > F table (54,188 > 3,14) dengan $p < 0,05$, maka H_0 ditolak berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari faktor dokumen perencanaan dan faktor kompetensi SDM secara bersama-sama terhadap realisasi anggaran belanja dengan demikian hipotesis yang diajukan dapat diterima kebenarannya. Bahwa

tinggi rendahnya realisasi anggaran belanja dipengaruhi oleh faktor dokumen perencanaan dan faktor kompetensi Sumber Daya Manusia

4.3.2. Hasil Uji t

Uji t ini menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual (parsial) dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil uji signifikansi parameter individual (uji statistik t) dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut ini.

Tabel 4.8

Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.216	1.208		1.834	.071
Dok.Prcn	.206	.055	.430	3.733	.000
Komp.SD					
M	.199	.055	.418	3.624	.001

a. Dependent Variable RAB

Sumber : Hasil olah data .

Dari tabel 4.8 di atas pengujian hipotesis dapat diuraikan sebagai berikut.

1. H1: faktor dokumen perencanaan berpengaruh positif terhadap realisasi anggaran belanja.

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai t sebesar 3,733 lebih besar dibanding nilai t tabel sebesar 1,9977 (df = 64; tingkat signifikansi 0,05) dengan signifikansi 0,000 lebih rendah dari 0,05. Hal ini

mengindikasikan bahwa variabel dokumen perencanaan berpengaruh positif terhadap realisasi anggaran belanja. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa H1 diterima.

2. H2 : faktor kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap realisasi anggaran belanja.

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai t sebesar 3,624 lebih besar dibanding nilai t tabel 1,9977 ($df = 64$; tingkat signifikansi 0,05) dengan signifikansi 0,001 lebih rendah dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel faktor kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap realisasi anggaran belanja. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa H2 diterima.

4.4. Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis

Pembahasan hasil pengujian hipotesis berdasarkan tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut.

4.4.1. Pengaruh Dokumen Perencanaan terhadap Realisasi Anggaran Belanja

Dokumen perencanaan merupakan proses yang kontinyu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu dimasa yang akan datang. Dokumen perencanaan dalam penelitian ini didasarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program kegiatan sehingga dapat merealisasikan anggarannya.

Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa dokumen perencanaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi anggaran belanja. Hasil pengujian hipotesis pertama memperoleh nilai t_{hitung} sebesar 3,733 diterima pada taraf signifikansi 5% ($p < 0,05$). Hal ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh dokumen perencanaan terhadap realisasi anggaran belanja. Hal ini mengindikasikan bahwa dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkontribusi penting terhadap tingkat realisasi penyerapan anggaran. Semakin baik dokumen perencanaan yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maka semakin baik dalam melaksanakan program kegiatan yang telah ditetapkan sehingga realisasi anggaran belanja dapat terserap secara optimal.

4.4.2. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Realisasi Anggaran Belanja

Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam penelitian ini didasarkan pada tingkat pendidikan dan keahlian yang digunakan sebagai kemampuan seseorang dalam melaksanakan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah sehingga dapat merealisasikan anggarannya dengan baik.

Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi anggaran belanja. Hasil pengujian hipotesis kedua diperoleh nilai t_{hitung}

sebesar 3,624 diterima pada taraf signifikansi 5% ($p < 0,05$). Hal ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh faktor kompetensi sumber daya manusia terhadap realisasi anggaran belanja. Artinya bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki peran penting terhadap tingkat realisasi penyerapan anggaran. Semakin kompeten pegawai atau sumber daya manusia maka semakin baik pula kinerjanya dalam merealisasikan anggaran, sehingga anggaran dapat terealisasi secara proporsional dan tujuan SKPD dapat dicapai.

Besarnya pengaruh dokumen perencanaan dan faktor kompetensi sumber daya manusia terhadap realisasi anggaran belanja ditunjukkan dengan besarnya nilai koefisien regresi berganda R^2 sebesar 0,617. Artinya besarnya pengaruh faktor dokumen perencanaan dan faktor kompetensi sumber daya manusia terhadap realisasi anggaran belanja adalah sebesar 61,7%.

Sedangkan 38,3% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Seperti perubahan anggaran, perubahan jadwal program kegiatan dikarenakan belum tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Kebanyakan Satuan Kerja Perangkat Daerah menganggarkan belanja modal yang berkaitan dengan infrastruktur di akhir triwulan 3 dan triwulan 4, sehingga waktu pelaksanaan pencairan dananya berdasarkan termin yang berakhir di akhir desember. Selain itu realisasi anggaran belanja yang menumpuk di akhir tahun terjadi karena program kegiatan yang dananya bersumber dari dana alokasi khusus belum dapat

dilaksanakan karena harus menunggu juknis yang terlambat disahkan. Sehingga program kegiatan belum bisa dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang disusun.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, dimana penelitian tersebut dilakukan pada Dinas Pendidikan Di Kabupaten Pohuwato maka diperoleh kesimpulan sebagai

1. Perencanaan individu berpengaruh positif terhadap realisasi anggaran belanja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato
2. Kompetensi sumber daya manusia secara individu berpengaruh positif terhadap realisasi anggaran belanja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato
3. Faktor Dokumen perencanaan dan Faktor kompetensi sumber daya manusia secara simultan berpengaruh terhadap realisasi anggaran belanja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato

5.2 Saran

Berdasarkan hasil temuan pada penelitian ini, maka diajukan saran-saran yang dapat memperbaiki penelitian ini agar mendapatkan hasil yang lebih baik, sebagai berikut.

1. Bagi kantor

Kendala yang berkaitan dengan kesulitan untuk merealisasikan anggaran belanja yang menumpuk di akhir tahun dapat diminimalisir dengan mengoptimalkan dokumen perencanaan dengan tepat dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dengan mengikutsertakan

pegawai dalam diklat atau kursus yang berkaitan dengan penatausahaan keuangan daerah.

2. Bagi peneliti selanjutnya

- a. Dalam mengisi kuesioner seharusnya responden menjawab secara serius sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, sehingga peneliti yakin bahwa data yang diberikan merupakan data yang benar dan dapat dipercaya.
- b. Penelitian ini hanya fokus pada realisasi anggaran belanja khususnya belanja modal, maka diharapkan peneliti selanjutnya dapat memperluas lagi cakupannya seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
- c. Keterbatasan pada penelitian ini hanya fokus pada satu Satuan Kerja Perangkat Daerah dan jumlah sampel yang terbatas, sehingga diharapkan peneliti selanjutnya dapat dikembangkan pada keseluruhan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam suatu pemerintah daerah untuk mendapatkan data yang lebih lengkap. Dan disarankan bagi peneliti selanjutnya agar menambah waktu penelitian sehingga data yang diperoleh dapat menyeluruh dan dapat melengkapi kekurangan yang ada pada penelitian ini.
- d. Penelitian ini hanya menguji dua faktor yaitu faktor dokumen perencanaan dan faktor kompetensi sumber daya manusia, maka disarankan untuk peneliti selanjutnya diharapkan menguji faktor-faktor lain seperti faktor administrasi, faktor uang persediaan dan faktor dokumen pengadaan barang dan jasa

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Hasan. 2008. *Marketing*. Yogyakarta: Media Pressindo
- .
- Aloysia dan Yuliana. 2004. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 16 No.2, 135-146.
- Andrianto, Heri. 2008. *Pemrograman Mikrokontroler AVR ATMega16*. Bandung: Penerbit Informatika
- .
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azhar, Susanto. 2007. *Sistem Informasi Akuntansi “Konsep dan Pengembangan Berbasis Komputer”*. Bandung: Lingga Jaya.
- Bastian, Indra. 2007. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dahlan, Siamat. 2003. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Djarwanto, PS dan Pangestu Subagyo. 1994. *Statistik Induktif*. Yogyakarta: BPFE.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: BP Universitas Diponegoro.
- Hadari, Nawawi. 2003. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Perss.
- Harryanto. 2008. *Perencanaan dan Penganggaran Daerah Pendekatan Kinerja*. Semarang: BP Universitas Diponegoro.
- Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mangkunegara, A. Anwar Prabu. 2006. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Refika Aditama.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.

- Munandar, M. 2001. *Budgeting, Perencanaan Kerja Pengkoordinasian Kerja Pengawasan Kerja*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE Universitas Gajah Mada.
- Nafarin, M. 2007. *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nordiawan, Deddi dan Hertianti, Ayuningtyas. 2010. *Akuntansi Sektor Publik, Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- Rumidi, Sukandar. 2002. *Penelitian Petunjuk Untuk Penelitian Pemula*. Yogyakarta: UGM Press.
- Rutoto, Sabar. 2007. *Pengantar Metodologi Penelitian*. FKIP: Universitas Muria Kudus.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofyan. 2006. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Soekidjo, Notoatmodjo . 2003. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sukoco, Badrir Munir. 2007. *Manajemen Administrasi Perkantoran Modern*. Jakarta: Erlangga.
- Suparno, Paul. 2005. *Miskonsepsi dan Perubahan Konsep dalam Pendidikan Fisika*. Yogyakarta: PT. Gramedia Widia Sarana.
- Supriyono, R.A. 1999. *Akuntansi Biaya Buku II: Perencanaan, Pengendalian, serta Pembuat Keputusan, Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE.

Syamsi, Ibnu.1994. *Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Rineka Cipta.

Tjiptoherijanto, Priyono. 2001. *Proyeksi Penduduk, Angkatan Kerja, Tenaga Kerja, dan Peran Serikat Pekerja dalam Peningkatan Kesejahteraan*. Majalah Perencanaan Pembangunan. Edisi 23.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan.2004. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Usman, Husaini. 2011. *Manajemen : Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*.Jakarta: Bumi Aksara.

Widodo, Joko. 2011. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.

Yustika, Ahmad dan Erani. 2012. *Perekonomian Indonesia: Catatan Dari Luar Pagar*. Malang: Bayumedia Publishing.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Jadwal Penelitian

Kegiatan	Tahun 2022																Tahun 2023																						
	Agustus				September				Oktober				November				Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei		
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
Observasi																																							
Usulan Judul																																							
Penyusunan Proposal & Ujian																																							
Proposal Revisi																																							
Proposal Pengolahan Data & Ujian																																							
Skripsi Revisi																																							
Skripsi																																							

Lampiran 2 Abstrak**ABSTRACT**

ASTRIANI MANOPO. E1119093. THE EFFECT OF PLANNING DOCUMENTS AND HUMAN RESOURCE COMPETENCIES ON THE EXPENDITURE BUDGET REALIZATION OF THE POHUWATO DISTRICT EDUCATION OFFICE

The purposes of this study are to know the effect of planning document factors on budget realization and to determine the effect of human resource competencies on budget realization. This study uses a quantitative research method. Quantitative research is used to examine populations or samples. Data is collected using instruments or measuring instruments, then analyzed statistically or quantitatively. Based on the result of the study, individual planning has a positive effect on the realization of the expenditure budget at the Pohuwato District Education Office. Individual human resource competencies have a positive effect on the realization of the budget at the Pohuwato District Education Office. Planning documents and human resource competencies simultaneously affect the realization of the budget at the Pohuwato District Education Office.

Keywords: planning documents, human resource competencies, budget realization



ABSTRAK

ASTRIANI MANOPO. E1119093. PENGARUH DOKUMEN PERENCANAAN DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP REALISASI ANGGARAN BELANJA DINAS PENDIDIKAN DI KABUPATEN POHUWATO

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh faktor dokumen perencanaan terhadap realisasi anggaran belanja. untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap realisasi anggaran belanja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti populasi atau sampel. Data dikumpulkan dengan menggunakan instrumen atau alat ukur, kemudian dianalisis dengan statistik atau secara kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian, perencanaan individu berpengaruh positif terhadap realisasi anggaran belanja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato. Kompetensi sumber daya manusia secara individu berpengaruh positif terhadap realisasi anggaran belanja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato. Dokumen perencanaan dan kompetensi sumber daya manusia secara simultan berpengaruh terhadap realisasi anggaran belanja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato.

Kata kunci: dokumen perencanaan, kompetensi sumber daya manusia, realisasi anggaran belanja



Lampiran 3 Skor Hasil Angket Faktor Dokumen Perencanaan, Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Realisasi Anggaran Belanja

R	Faktor Dokumen Perencanaan(X1)									Faktor Kompetensi SDM(X2)									Realisasi Anggaran Belanja(Y)				
	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	TS	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	TS	Y1	Y2	Y3	Y4	TS
1	4	4	5	3	4	4	4	4	32	4	4	5	4	4	3	3	3	30	4	4	4	5	17
2	4	4	4	4	3	3	3	4	29	4	4	3	4	4	4	3	4	30	4	4	4	3	15
3	4	4	4	3	3	4	4	4	30	4	4	4	4	5	4	4	5	34	4	3	4	5	16
4	5	4	4	3	5	3	3	3	30	4	3	3	4	2	4	4	4	28	4	4	4	4	16
5	5	4	4	3	3	3	3	3	28	4	3	3	4	3	4	4	4	29	4	4	4	4	16
6	4	4	3	4	4	4	4	4	31	5	4	4	4	4	3	3	4	31	3	4	3	3	13
7	5	4	3	4	4	5	4	4	33	5	4	4	4	5	3	3	4	32	5	5	5	4	19
8	5	4	5	4	4	4	4	4	34	4	4	5	4	4	4	4	4	33	5	5	5	4	19
9	5	4	5	4	4	5	4	5	36	5	4	5	4	4	4	4	4	34	4	5	5	5	19

10	5	5	3	4	4	5	5	5	36	5	4	4	4	5	3	3	2	30	4	4	4	4	16
----	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	----

11	5	4	4	3	3	3	3	3	28	4	3	3	4	3	4	4	4	29	4	4	4	4	16
12	4	4	3	4	4	4	4	4	31	5	4	4	4	4	3	3	4	31	3	4	3	3	13
13	5	4	3	4	4	5	4	4	33	5	4	4	4	5	3	3	4	32	5	5	5	4	19
14	5	4	5	4	4	4	4	4	34	4	4	5	4	4	4	4	4	33	5	5	5	4	19
15	5	4	5	4	4	5	4	5	36	5	4	5	4	4	4	4	4	34	4	5	5	5	19
16	4	4	5	3	4	4	4	4	32	4	4	5	4	4	3	3	3	30	4	4	4	5	17
17	4	4	4	4	3	3	3	4	29	4	4	3	4	4	4	3	4	30	4	4	4	3	15
18	4	4	4	3	3	4	4	4	30	4	4	4	4	5	4	4	5	34	4	3	4	5	16
19	5	4	4	3	5	3	3	3	30	4	3	3	4	2	4	4	4	28	4	4	4	4	16
20	5	4	4	3	3	3	3	3	28	4	3	3	4	3	4	4	4	29	4	4	4	4	16
21	4	4	3	4	4	4	4	4	31	5	4	4	4	4	3	3	4	31	3	4	3	3	13
22	5	4	3	4	4	5	4	4	33	5	4	4	4	5	3	3	4	32	5	5	5	4	19

23	5	4	5	4	4	4	4	4	34	4	4	5	4	4	4	4	4	33	5	5	5	4	19
24	5	4	5	4	4	5	4	5	36	5	4	5	4	4	4	4	4	34	4	5	5	5	19

25	5	5	3	4	4	5	5	5	36	5	4	4	4	5	3	3	2	30	4	4	4	4	16
26	4	4	3	4	4	4	4	4	31	5	4	4	4	4	3	3	4	31	3	4	3	3	13
27	5	4	3	4	4	5	4	4	33	5	4	4	4	5	3	3	4	32	5	5	5	4	19
28	5	4	5	4	4	4	4	4	34	4	4	5	4	4	4	4	4	33	5	5	5	4	19
29	5	4	5	4	4	5	4	5	36	5	4	5	4	4	4	4	4	34	4	5	5	5	19
30	4	4	5	3	4	4	4	4	32	4	4	5	4	4	3	3	3	30	4	4	4	5	17
31	4	4	4	4	3	3	3	4	29	4	4	3	4	4	4	3	4	30	4	4	4	3	15
32	4	4	4	3	3	4	4	4	30	4	4	4	4	5	4	4	5	34	4	3	4	5	16
33	5	4	4	3	5	3	3	3	30	4	3	3	4	2	4	4	4	28	4	4	4	4	16
34	5	4	4	3	3	3	3	3	28	4	3	3	4	3	4	4	4	29	4	4	4	4	16
35	4	4	3	4	4	4	4	4	31	5	4	4	4	4	3	3	4	31	3	4	3	3	13

36	5	4	3	4	4	5	4	4	33	5	4	4	4	5	3	3	4	32	5	5	5	4	19
37	5	4	5	4	4	4	4	4	34	4	4	5	4	4	4	4	4	33	5	5	5	4	19
38	4	4	5	3	4	4	4	4	32	4	4	5	4	4	3	3	3	30	4	4	4	5	17

39	4	4	4	4	3	3	3	4	29	4	4	3	4	4	4	3	4	30	4	4	4	3	15
40	4	4	4	3	3	4	4	4	30	4	4	4	4	5	4	4	5	34	4	3	4	5	16
41	5	4	4	3	5	3	3	3	30	4	3	3	4	2	4	4	4	28	4	4	4	4	16
42	5	4	4	3	3	3	3	3	28	4	3	3	4	3	4	4	4	29	4	4	4	4	16
43	4	4	3	4	4	4	4	4	31	5	4	4	4	4	3	3	4	31	3	4	3	3	13
44	5	4	3	4	4	5	4	4	33	5	4	4	4	5	3	3	4	32	5	5	5	4	19
45	5	4	5	4	4	4	4	4	34	4	4	5	4	4	4	4	4	33	5	5	5	4	19
46	5	4	5	4	4	5	4	5	36	5	4	5	4	4	4	4	4	34	4	5	5	5	19
47	5	5	3	4	4	5	5	5	36	5	4	4	4	5	3	3	2	30	4	4	4	4	16
48	5	4	4	3	3	3	3	3	28	4	3	3	4	3	4	4	4	29	4	4	4	4	16

49	4	4	3	4	4	4	4	4	31	5	4	4	4	4	3	3	4	31	3	4	3	3	13
50	5	4	4	3	3	3	3	3	28	4	3	3	4	3	4	4	4	29	4	4	4	4	16

Lampiran 4 Hasil Uji Validitas Faktor Dokumen Perencanaan (X1)

Correlations

	Dok.Prcn_1	Dok.Prcn_2	Dok.Prcn_3	Dok.Prcn_4	Dok.Prcn_5	Dok.Prcn_6	Dok.Prcn_7	Dok.Prcn_8	Total Skor
Dok. Pearson Correlation	1	.333**	.199	.083	.224*	.355*	.244*	.262*	.564*
Prcn Sig. (2-tailed)		.006	.106	.503	.047	.003	.046	.032	.000
_1 N	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Dok. Pearson Correlation	.333**	.1	.118	.282*	.224	.415**	.242*	.405**	.598*
Prcn Sig. (2-tailed)	.006		.340	.021	.069	.000	.048	.001	.000
_2 N	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Dok. Pearson Correlation	.199	.118	.1	.170	.076	.196	.005	.059	.437**
Prcn Sig. (2-tailed)	.106	.340		.169	.541	.111	.969	.636	.000
_3 N	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Dok. Pearson	.083	.282	.170	.1	.323**	.439**	.406**	.135	.619

Correlation	.503	.021	.169		.008	.000	.001	.276	.000
Prcn Sig. (2-tailed)	50	50	50	50	50	50	50	50	50
_4 N									

Dok. Pearson Correlation	.244*	.224	.076	.323	1	.452**	.372**	.106	.565
Prcn Sig. (2-tailed)	.047	.069	.541	.008		.000	.002	.391	.000
_5 N	50	50	50	50	50.	50	50	50	50
Dok. Pearson Correlation	.355**	.415**	.196	.439**	.452**	1	.397**	.429**	.787**
Prcn Sig. (2-tailed)	.003	.000	.111	.000	.000		.001	.000	.000
_6 N	50	50	50	50	50	50.	50	50	50
Dok. Pearson Correlation	.244**	.242*	.005	.406**	.135	.106	1	.369**	.616**
Prcn Sig. (2-tailed)	.046	.048	.969	.001	.276	.391		.002	.000
_7 N	50	50	50	50	50	50	50.	50	50
Dok. Pearson Correlation	.262*	.405*	.059	.135	.106	.429**	.369**	1	.560**
Prcn Sig. (2-tailed)	.032	.001	.636	.276	.391	.000	.002		.000
_8 N	50	50	50	50.	50	50	50	50	50

Total	Pearson Correlation	.564**	.598**	.437**	.619**	.565**	.787**	.616**	.560**	1
Sko	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
_r	N	50	5	50	50	50	50	50	50	50

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

TABEL HASIL FAKTOR DOKUMENTASI PERENCANAAN (X1)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.740	8

Lampiran 5 Hasil Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.723	8

Lampiran 6 Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Realisasi Anggaran Belanja (Y)

		Correlations				
		Komp SDM _1	Komp SDM_2	Komp SDM_3	Komp SDM_4	Total Skor
RAB	Pearson Correlation	.394**	1	.646**	.429*	.803**
_ 2	Sig. (2-tailed)	.001		.000	.000	.000
	N	50	50	50	50	50
Komp	Pearson Correlation	.358**	.646**	1	.361*	.756**
SDM_3	Sig. (2-tailed)	.003	.000		.003	.000
	N	50	50.	50	50	50
Komp	Pearson Correlation	.454**	.429**	.361**	1	.764**
SDM_ 4	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	50	50	50	50	50
Total	Pearson Correlation	.721**	.803**	.751**	.764**	1
Sko	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
_r	N	50	50	50	50	50

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.759	4

Lampiran 7 Hasil Regresi Linear Berganda, Koefesien Determinasi (R^2), Uji F, dan Uji t

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Komp.SDM, Dok.Prcn ^b		Enter

a. Dependent Variable: RAB

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.793 ^a	.629	.617	2.668

a. Predictors: (Constant), Komp.SDM, Dok.Prcn

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
1	Regression	771.298	2	385.649	54.189	.000 ^a
	Residual	455.478	49	7.117		

Total	1226.776	51			
-------	----------	----	--	--	--

a. Dependent Variable: RAB

b. Predictors: (Constant), Komp.SDM, Dok.Prcn

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.216	1.208		1.834	.071
Dok.Prcn	.206	.055	.430	3.733	.000
Komp.SDM	.199	.055	.418	3.624	.001

a. Dependent Variable: RAB

Lampiran 8

E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt 3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 104/PIP/LEMLIT-UNISAN/I/2023
Lampiran :
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada YTH.
Kepala Kesbangpol Kabupaten Pohuwato
Di **Tempat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : DR. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN : 0929117202
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan proposal/skripsi, kepada:

Nama Mahasiswa : Astriani Manopo
NIM : E1119093
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Lokasi Penelitian : Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato.
Judul penelitian : Pengaruh dokumen perencanaan, kompetensi sumber daya manusia terhadap realisasi anggaran belanja Dinas Pendidikan di Kabupaten Pohuwato.

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 11 Januari 2023



DR. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN : 0929117202

Lampiran 9 Surat Balasan Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat Jl. KH.Dewantoro Perkantoran Marisa Kode Pos 96266

E-mail: dispendbudkpegawasaan@gmail.com

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 800 / Dikbud / 278 / Sek / IV / 2023

Dengan ini menerangkan bahwa yang bertanda dibawah ini :

Nama : **ASTRIANI MANOPO**
 Tempat, Tgl Lahir : Lemito, 13 September 2000
 Alamat : Desa Suka Damai Kec. Lemito Kab. Pohuwato
 NIM : E1119093
 Jurusan/Fakultas : Akuntansi / Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo

Bahwa mahasiswa yang disebut diatas telah selesai melaksanakan penelitian guna untuk Penyusunan Skripsi, dengan judul **"PENGARUH DOKUMEN PERENCANAAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP REALISASI ANGGARAN BELANJA DI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN POHUWATO"**.


Dengan waktu penyelesaian penelitian sejak tanggal 20 Maret 2023 s.d 20 April 2023.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Marisa, 03 April 2023
 KEPALA DINAS

IKBAR A. L. SALAM, S.Pd
 NIP. 19640424 196410 1 005

Lampiran 10 Surat Rekomendasi Bebas Plagiasi

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS EKONOMI
 SK. MENDIKNAS NOMOR 84/D/O/2001 STATUS TERAKREDITASI BAN-PT.DIKTI
 Jalan : Achmad Nadjamuddin No.17 Telp/Fax.(0435) 829975 Kota Gorontalo. www.fe.unisan.ac.id

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 109/SRP/FE-UNISAN/I/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Musafir, SE., M.Si
 NIDN : 09281169010
 Jabatan : Dekan


Dengan ini menerangkan bahwa


Nama Mahasiswa : Astriani Manopo
 NIM : E1119093
 Program Studi : Akuntansi
 Fakultas : Ekonomi
 Judul Skripsi : Pengaruh Dokumen Perencanaan, Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Di Kabupaten Pohuwato

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 24%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan. Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Gorontalo, 05 Mei 2023
 Tim Verifikasi,

Mengetahui
 Dekan,


DR. Musafir, SE., M.Si
 NIDN. 0928116901


Muh. Sabir M, SE., M.Si
 NIDN. 0913088503

Terlampir : Hasil Pengecekan Turnitin

Lampiran 11 Hasil Turnitin



Similarity Report ID: oid:25211:34043117

PAPER NAME

**ASTRIANI MANOPO (E11.19.093)-sk - 1.
docx**

AUTHOR

ASTRIANI MANOPO

WORD COUNT

12271 Words

CHARACTER COUNT

82410 Characters

PAGE COUNT

80 Pages

FILE SIZE

146.9KB

SUBMISSION DATE

Apr 15, 2023 9:28 AM GMT+7

REPORT DATE

Apr 15, 2023 9:29 AM GMT+7

● 24% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 24% Internet database
- 1% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Cited material
- Small Matches (Less than 30 words)



Similarity Report ID: oid:25211:3404311

24% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 24% Internet database
- 1% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

- 1 repository.unhas.ac.id** 21
Internet
- 2 adoc.pub**
Internet
- 3 repository.unmuha.ac.id**
Internet
- 4 LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-07-16**
Submitted works
- 5 eprints.unisbank.ac.id**
Internet
- 6 scribd.com**
Internet

Lampiran 12

CURRICULUM VITAE

1. Identitas Pribadi



Nama	: ASTRIANI MANOPO
NIM	:E1119093
Tempat/Tgl Lahir	: Desa Suka damai,13 September 2000
Jenis Kelamin	: Perempuan
Angkatan	: 2019
Fakultas:	Ekonomi
Program Studi	: Akuntansi
Agama	: Islam
Alamat	: Desa Teratai Kec Marisa Kab Pohuwato

2. Riwayat Pendidikan

1. Menyelesaikan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar di SD Negeri Suka Damai pada tahun 2013
2. Kemudian melanjutkan ke jenjang selanjutnya Yakni di SMP Negeri SATAP dan Lulus Pada tahun 2016
3. Selanjutnya melanjutkan ke jenjang berikutnya yakni di SMA Negeri 1 Marisa dan Lulus pada Tahun 2019
4. Melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas ichsan Gorontalo, mengambil Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi pada tahun 2019.

